



**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI PADA  
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN "TAMAN PUTRI" DESA  
KEMIRI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

*EMPOWERING STRATEGY COFFEE FARMERS AT LEMBAGA  
MASYARAKAT DESA HUTAN "TAMAN PUTRI" IN KEMIRI VILLAGE  
SUBDISTRICT PANTI JEMBER REGENCY*

**SKRIPSI**

Oleh

**Mardit Eko Prastio**

**100910301021**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI PADA  
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN "TAMAN PUTRI" DESA  
KEMIRI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

*EMPOWERING STRATEGY COFFEE FARMERS AT LEMBAGA  
MASYARAKAT DESA HUTAN "TAMAN PUTRI" IN KEMIRI VILLAGE  
SUBDISTRICT PANTI JEMBER REGENCY*

**SKRIPSI**

Oleh  
**Mardit Eko Prastio**  
100910301021

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

**PERSEMBAHAN**

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, saya mempersembahkan skripsi ini bagi semua pihak yang membacanya dengan harapan dapat memberi koreksi konstruktif apabila terdapat kesalahan.



**MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka  
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”  
(Terjemahan QS. Ar-Ra’d [13] :11)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, 2000. *Al Qur'an dan Terjemahannya*.  
Bandung: CV Diponegoro

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardit Eko Prastio

NIM : 100910301021

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI PADA LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN "TAMAN PUTRI" DESA KEMIRI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan kesediaan mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Mei 2018

Yang menyatakan,

**Mardit Eko Prastio**  
**100910301021**

**SKRIPSI**

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI PADA  
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN "TAMAN PUTRI" DESA  
KEMIRI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Mardit Eko Prastio

100910301021

Dosen Pembimbing Utama

**Budhy Santoso, S.Sos., M.Si, Ph.D**

**NIP 197012131997021001**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan "Taman Putri" Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember" telah diuji pada :

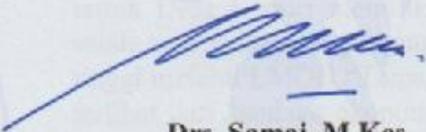
Hari, tanggal : Rabu, 28 Februari 2018

Tempat : Ruang sidang jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

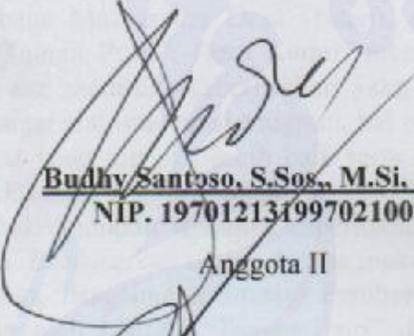
**Tim Penguji :**

Ketua

Sekretaris

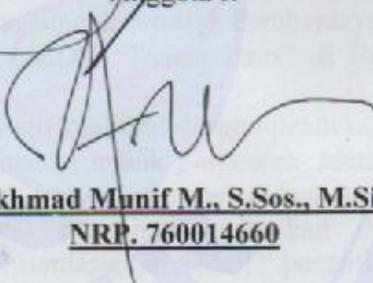
  
Drs. Samai, M.Kes  
NIP. 195711241987021001

Anggota I

  
Budhy Santoso, S.Sos., M.Si, Ph.D  
NIP. 197012131997021001

Anggota II

  
Dr. Nur Dviah Gianawati  
NIP. 195806091985032003

  
Akhmad Munif M., S.Sos., M.Si  
NRP. 760014660

Mengesahkan,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ardiyanto, M.Si.  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan "Taman Putri" Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.** Mardit Eko Prastio, 100910301021, 2018, halaman, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Salah satu sentra produksi kopi di Kabupaten Jember adalah Desa Kemiri Kecamatan Panti dimana wilayah Desa kemiri juga merupakan wilayah penyangga konservasi untuk menghindari erosi banjir. Kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada sumber daya hutan sehingga menjadikan kawasan sekitar hutan seperti Desa Kemiri menjadi sasaran dari Program *Social Forestry*, dimana masyarakatnya membutuhkan untuk diberdayakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya serta memberikan pemahaman tentang pelestarian lingkungan hutan yang menjadi tempat pemenuh kebutuhan masyarakat.

Realisasi dalam Program Sosial Forestry salah satunya adalah Program Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang menghasilkan salah satu organisasi masyarakat yang mengorganisir masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan yaitu LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), dimana untuk Desa Kemiri memiliki LMDH "Taman Putri". Desa Kemiri merupakan salah satu pelaksana program PHBM yang memiliki keberhasilan yang cukup tinggi melalui LMDH "Taman Putri" sebagai alat intervensi program, hal tersebut terlihat dari keadaan ekonomi masyarakat yang menjadi lebih baik serta system pengelolaan hutan masyarakat tersebut lakukan menjadi sangat memperhatikan kelestarian hutan, untuk mewujudkan hal demikian tentunya diperlukan suatu strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut, "Bagaimana Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi yang dilakukan oleh LMDH "Taman Putri" di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?".

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis, pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian, menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat petani kopi yang dilakukan oleh LMDH "Taman Putri" Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Jember ini dilakukan melalui dua strategi yaitu : (1) Strategi Pengorganisasian Masyarakat; (2) Strategi Pelatihan Pengolahan dan Pengembangan Hasil Tani Hutan. Kedua strategi ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui lima tahapan kegiatan, yaitu : (a) Pemahaman Situasi Masyarakat; (b) Pembentukan Kelompok LMDH dan Sosialisasi Program PHBM; (c) Penentuan Komoditi Sesuai dengan Kebutuhan Kelompok LMDH dan Lingkungan; (d) Peningkatan Kemampuan Kelompok LMDH "Taman Putri" dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan; (e) Pengembangan Kelembagaan.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan ”**. Skripsi ini di susun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan ilmu kesejahteraan sosial fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas jember.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT .
2. Kepada bapak Dr. Ardiyanto,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Pairan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Arif, S.Sos., M.AP selaku pembimbing akademik.
5. Bapak Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, dan seluruh civitas akademika yang telah membantu, melancarkan administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Bapak Risky selaku pegawai bagian pelayanan mahasiswa jurusan ilmu kesejahteraan sosial, yang telah sabar dan membantu banyak kepada penulis dalam kelengkapan prosedur akademik.
8. Teman-teman KS, terima kasih atas kenangan indah yang kalian berikan pada saya selama ini.

9. Bapak dan ibu penguji skripsi jurusan ilmu kesejahteraan sosial yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membangun terhadap penulisan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan bukan milik manusia tetapi hanya milik yang kuasa. Sehingga disampaikan ucapan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat.

Jember, 15 Februari 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN BIMBINGAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Konsep Masyarakat Sekitar Hutan .....</b>	<b>12</b>
<b>2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Sekitar hutan .....</b>	<b>15</b>
<b>2.3 Konsep <i>Social Forestry</i> Program Pengelolaan hutan Bersama         Masyarakat (PHBM) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan         (LMDH).....</b>	<b>17</b>
<b>2.4 Konsep Strategi Pemberdayaan Masyarakat .....</b>	<b>25</b>

<b>2.5 Konsep Strategi Pengorganisasian ,Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas .....</b>	<b>27</b>
<b>2.6 Konsep Kesejahteraan Sosial .....</b>	<b>36</b>
<b>2.7 Kajian Terhadap PenelitianTerdahulu .....</b>	<b>38</b>
<b>2.8 Kerangka Pikir Konsep Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
<b>3.1 Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>44</b>
3.1.1 Jenis Penelitian .....	45
3.1.2 Penentuan Lokasi Penelitian.....	45
<b>3.2 Teknik Penentuan Informan .....</b>	<b>46</b>
3.2.1 Informan Pokok ( <i>Primary</i> Informan) .....	48
3.2.2 Informan Tambahan ( <i>Secondary</i> Informan) .....	50
<b>3.3 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>53</b>
3.3.1 Observasi.....	53
3.3.2 Wawancara .....	54
3.3.3 Dokumentasi.....	55
<b>3.4 Teknik Analisis Data.....</b>	<b>56</b>
<b>3.5 Keabsahan Data .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
<b>4.1 Hasil.....</b>	<b>60</b>
4.1.1 Geografis/Data Wilayah dan Demografi/Data Kependudukan .....	60
4.1.2 Sejarah LMDH “Taman Putri” dan Keterkaitannya dengan Pemberdayaan Masyarakat .....	67
4.1.3 Struktur Organisasi LMDH “Taman Putri” dan Peran Anggota dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	71

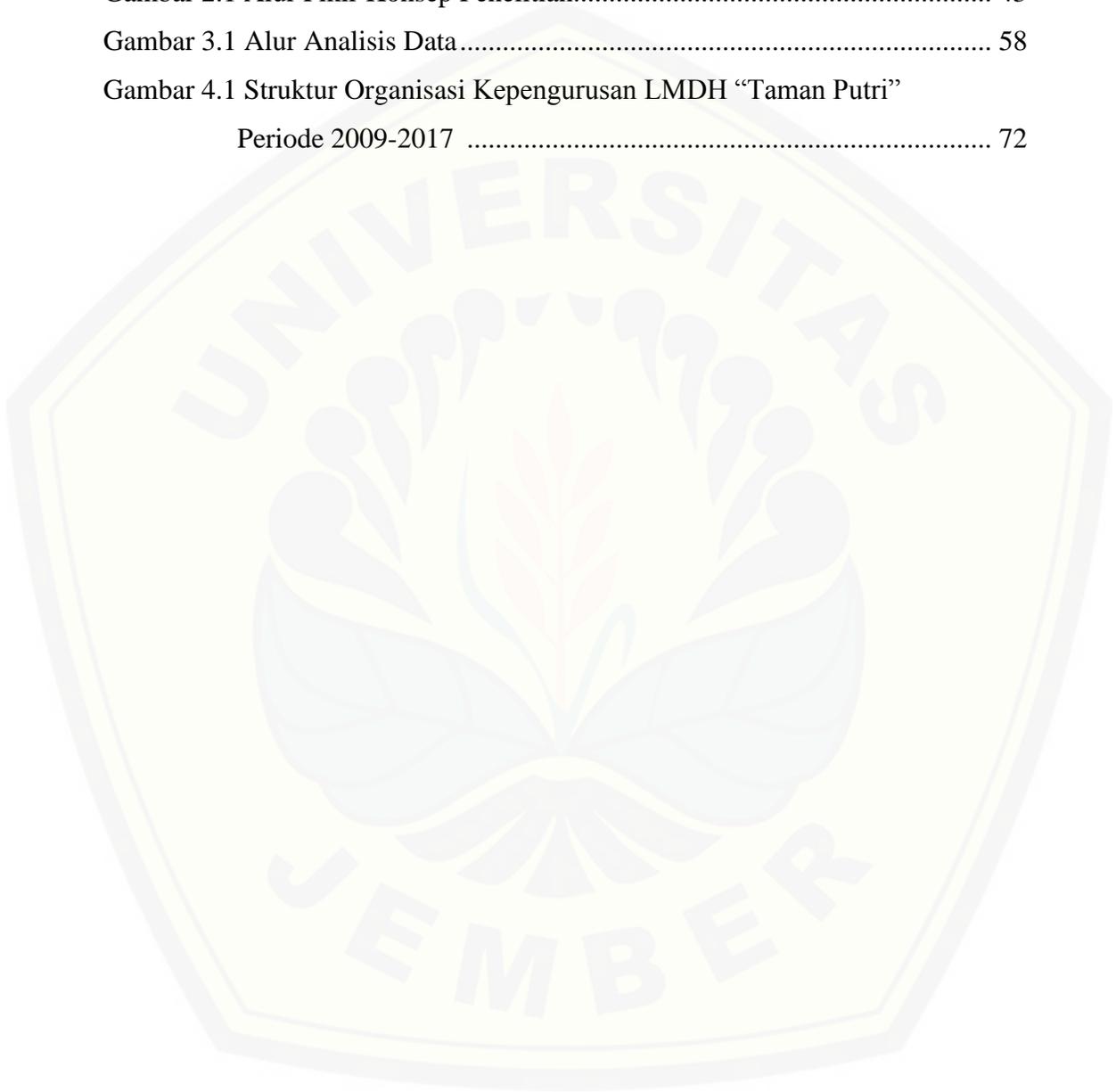
4.1.4	Gambaran Pengelolaan Lahan Perhutani Oleh LMDH “Taman Putri” dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	74
<b>4.2</b>	<b>Pembahasan .....</b>	<b>79</b>
4.2.1	Strategi Pemberdayaan LMDH “Taman Putri” .....	80
a	Pengorganisasian Masyarakat .....	85
b	Pelatihan Pengolahan dan Pengembangan hasil Tani Hutan.....	88
4.2.2	Tahapan Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan LMDH “Taman Putri” .....	90
a.	Pemahaman Situasi Masyarakat .....	90
b.	Pembentukan Kelompok LMDH dan Sosialisasi Program PHBM.....	92
c.	Penentuan Komoditi Sesuai dengan kebutuhan kelompok LMDH dan lingkungan .....	97
d.	Peningkatan Kemampuan Kelompok LMDH dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan .....	99
e.	Pengembangan Kelembagaan .....	101
<b>BAB 5.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>104</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran.....</b>	<b>106</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>108</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Model Tahapan Dasar Pekerjaan Pengembangan Masyarakat .....	29
Tabel 3.1 Kategorisasi Informan Pokok .....	48
Tabel 3.2 Identitas Informan Pokok dan Jabatannya .....	49
Tabel 3.3 Kategorisasi Informan Tambahan .....	51
Tabel 3.4 Identitas Informan Tambahan .....	52
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Kemiri Menurut Penggunaan Tahun 2012 .....	61
Tabel 4.2 Sebaran Penduduk Berdasarkan Spesifikasi Kelompok Umur .....	62
Tahun 2012	
Tabel 4.3 Distribusi jumlah penduduk menurut kepala keluarga tahun 2012 ....	64
Tabel 4.4 Distribusi Penduduk Desa Kemiri Kecamatan Panti Berdasarkan Struktur Mata Pencahariannya Tahun 2012 .....	65

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Alur Fikir Konsep Penelitian.....	43
Gambar 3.1 Alur Analisis Data.....	58
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kepengurusan LMDH “Taman Putri” Periode 2009-2017 .....	72



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Tabel Research Gap/Kajian Penelitian Terdahulu

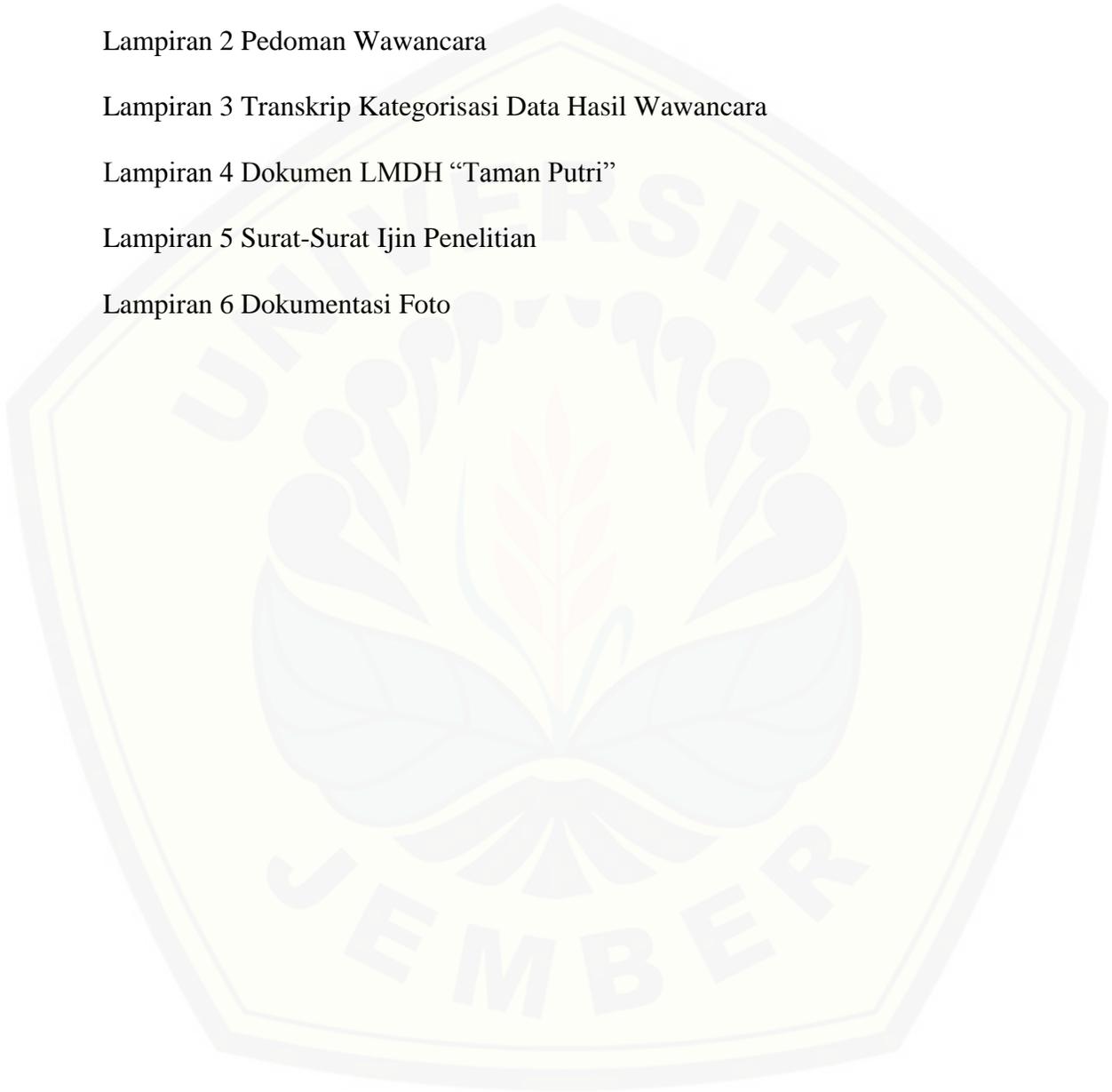
Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Transkrip Kategorisasi Data Hasil Wawancara

Lampiran 4 Dokumen LMDH “Taman Putri”

Lampiran 5 Surat-Surat Ijin Penelitian

Lampiran 6 Dokumentasi Foto



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jember merupakan salah satu wilayah penghasil kopi terbesar di Jawa Timur dengan luas areal 5.608 ha setelah Kabupaten Malang seluas 11.690 ha (Dinas Perkebunan Jawa Timur, 2010). Areal yang digunakan untuk pertanaman kopi cukup luas, dan penguasaannya didominasi oleh perkebunan rakyat. Hal tersebut menunjukkan potensi alam yang dimiliki oleh kabupaten Jember khususnya dalam bidang perkebunan kopi, salah satu kecamatan di Kabupaten Jember yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha perkebunan kopi adalah Kecamatan Panti dengan luas areal 389.09 ha dan produktivitasnya 4,55 kw/ha dan produksinya 1.537,76 kw menempati posisi kedua setelah Kecamatan Silo (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember, 2010).

Salah satu sentra produksi kopi di Kabupaten Jember adalah Desa Kemiri Kecamatan Panti dimana wilayah Desa kemiri juga merupakan wilayah penyangga konservasi untuk menghindari erosi banjir dari Gunung Bromo dengan kemiringan tanah yang sangat tajam. Selain itu berdasarkan data Profil Desa Kemiri tahun 2012 mayoritas penduduk di Desa Kemiri kecamatan Panti bermata pencaharian sebagai buruh perkebunan dengan persentase (41.86%). Mata pencaharian terbesar kedua yaitu sebagai buruh tani dengan persentase (25,5%). Mata pencaharian terbesar ketiga yaitu sebesar (12%) sebagai petemak kambing atau sapi dan hanya (5%) masyarakat Desa Kemiri yang bekerja menjadi petani. Sebesar (3,04%) penduduk Desa Kemiri Kecamatan Panti bekerja sebagai pemilik toko atau perancangan dan sebagian besar toko tersebut digunakan sebagai mata pencaharian sampingan. Data tersebut memperlihatkan bahwa lahan perkebunan dan hutan yang ada di desa ini menjadi lahan sumber pengahsilan penduduk desa. Selain itu wilayah Desa kemiri ini merupakan wilayah terluas yang ditempati perkebunan karena di desa ini terdapat 3 perkebunan yang berbeda yaitu Perkebunan PDP AFD Kali Putih, Perkebunan PDP

AFD Gentoong, dan Perkebunan Keputren, oleh karena itu tidak heran jika mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah buruh perkebunan.

Banyaknya penduduk Desa Kemiri yang bermata pencaharian sebagai buruh perkebunan ternyata memberikan dampak yang besar terhadap perubahan lingkungan yang ada di daerah mereka, karena kemampuan tentang pengolahan tanaman yang sebagian besar adalah kopi mereka dapat dari perkebunan yang ada di daerah mereka dan terhimpit oleh keadaan ekonomi yang saat itu masih terbelakang, sehingga keadaan ini memaksa mereka untuk membuka lahan sendiri di daerah hutan yang pada kenyataannya itu merupakan lahan hutan lindung. Tahun 2000-2001 tercatat bahwa perkebunan kopi rakyat di daerah panti jember meningkat dari yang awalnya 300 hektar menjadi 348,5 hektar hal ini memperlihatkan bahwa para masyarakat yang dulunya menjadi buruh kopi di perkebunan kopi yang terdapat di kecamatan tersebut memutuskan untuk membuka lahan sendiri di daerah hutan. Hal ini menjelaskan bahwa terjadi perubahan lingkungan yang signifikan di dalam hutan dan petani kopi yang menjadi berperan besar dalam hal ini (BPS : 2000-2005).

Perubahan lingkungan hutan yang terjadi khususnya di lingkungan hutan lindung yang berada di Desa Kemiri ini perlu penanganan yang tepat sehingga tidak terjadi berlarut-larut dan perubahan lingkungan hutan tidak meluas. Di Indonesia, kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan tersebut diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007, dimana perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Desa Kemiri adalah salah satu tempat pelaksanaan program Sosial Forestry yang dilakukan oleh pihak Perhutani terhadap wilayah hutan mereka sesuai dengan Permenhut No. P. 37/Menhut-II/2007, dimana wilayah hutan di Desa Kemiri merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Kriteria kawasan yang dapat ditetapkan sebagai *Social forestry* adalah hutan produksi atau hutan lindung, tidak dibebani hak atau ijin lain dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Wilayah Desa Kemiri merupakan kawasan yang termasuk wilayah pemukiman sekitar hutan sehingga masyarakatnya dapat disebut dengan masyarakat desa hutan, dimana keadaan masyarakatnya berkecenderungan masih miskin yang tidak punya kemampuan untuk mengakses informasi, teknologi, modal dan pasar bahkan sarana prasarana seperti jalan dan penerangan (listrik) pun belum ada. Masyarakatnya masih terbelakang baik pengetahuan, maupun pendidikannya. Budayanya masih sangat tradisional akan tetapi mempunyai komunitas sosial yang kental dalam kegotongroyongannya antar masyarakat. Berdasarkan Renstra Kemenhut 2010 – 2014 kondisi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan berjumlah 31.957 desa. 1.305 desa berada di dalam kawasan hutan, 22.709 desa berada di sekitar kawasan hutan dan desa yang berada di tepi kawasan hutan berjumlah 7.943 desa. Sedangkan masyarakat miskin di Indonesia berjumlah kurang lebih 48,8 juta penduduk bermukim di wilayah hutan Negara (Brown & Sunderlin 2005). Diantaranya 10,2 juta masuk katagori masyarakat miskin. Dan kurang lebih 6 juta jiwa kehidupnya sangat bergantung pada sumber daya hutan. Alasan ini pula yang menjadikan kawasan sekitar hutan seperti Desa Kemiri menjadi sasaran dari Program *Social Forestry*, dimana masyarakatnya membutuhkan untuk diberdayakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya serta memberikan pemahaman tentang pelestarian lingkungan hutan yang menjadi tempat pemenuh kebutuhan masyarakat. (<http://bp2sdm.menlhk.go.id>, diakses tanggal 28 Januari 2017)

Realisasi di lapangan dalam Program Sosial Forestry salah satunya adalah Program Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang melibatkan langsung masyarakat desa hutan (MDH) yang bertempat tinggal di sekitar hutan dan bersama-sama pihak perhutani dalam pelestariaa hutan lindung, untuk Desa Kemiri masyarakat yang terlibat adalah para petani kopi. PHBM merupakan bentuk sinergi dari Perhutani selaku lembaga bisnis milik pemerintah dengan masyarakat desa hutan untuk tujuan optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan secara progresif dan proporsional. Selain untuk kepentingan bisnis, keberadaan PHBM berfungsi untuk menjaga konservasi lingkungan hutan serta mempertahankan eksistensi sosial ekonomi

masyarakat desa hutan. Partisipasi masyarakat dalam program ini ternyata sangat memberikan manfaat untuk mereka, hal ini diperlihatkan dari kemajuan kehidupan para petani yang telah mengikuti program ini menjadi lebih sejahtera dilihat dari tempat tinggal yang dimiliki menjadi lebih layak.

Melalui observasi yang dilakukan peneliti, Program PHBM menghasilkan salah satu organisasi masyarakat yang mengorganisir masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan yaitu LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), dimana untuk Desa Kemiri memiliki LMDH “Taman Putri” melalui organisasi ini perhutani memberikan jalan bagi masyarakat untuk dapat bekerjasama dengan sesama petani yang mengelola wilayah hutan maupun dengan stakeholder lain yang mendukung kegiatan pengelolaan hutan lindung tersebut. Melalui organisasi ini pula pengetahuan dan ketrampilan para petani ini meningkat, sehingga dalam proses pengelolaan hutan mereka lebih mengutamakan pelestarian hutan dan menjaga hutan aman dari para penjarah liar. Selain itu melalui kerjasama yang dilakukan organisasi ini dengan stakeholder lain memberikan pengetahuan yang lain pula kepada mereka, seperti pengetahuan tentang ternak hewan sehingga dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi kehidupan mereka.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa LMDH “Taman Putri” termasuk dalam organisasi yang berfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep bahasan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial, dan ini dilakukan oleh LMDH dalam rangka mengorganisir masyarakat dan mengarahkannya untuk memaksimalkan potensi diri serta memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya yang tergolong dalam bentuk dari usaha kesejahteraan sosial. Selain hal tersebut telah diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program PHBM yang merupakan turunan program Social Forestry yang memiliki prinsip keterkaitan antara alam dalam hal ini adalah hutan dengan lingkungan sekitarnya yaitu masyarakat sekitar hutan yang memperlihatkan bahwa program ini sangat berkaitan dengan konsep Ilmu Kesejahteraan Sosial dalam hal ini merupakan bentuk sinergi dari Perhutani selaku lembaga bisnis milik

pemerintah dengan masyarakat desa hutan untuk tujuan optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan secara progresif dan proporsional dengan tidak mengabaikan keadaan masyarakat sekitar hutan. Herawaty (2013) menjelaskan bahwa selain untuk kepentingan bisnis, keberadaan PHBM berfungsi untuk menjaga konservasi lingkungan hutan serta mempertahankan eksistensi sosial ekonomi masyarakat desa hutan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Desa Kemiri merupakan salah satu pelaksana program PHBM yang memiliki keberhasilan yang cukup tinggi melalui LMDH “Taman Putri” sebagai alat intervensi program, hal tersebut terlihat dari keadaan ekonomi masyarakat yang menjadi lebih baik serta system pengelolaan hutan masyarakat tersebut lakukan menjadi sangat memperhatikan kelestarian hutan. Dalam keberhasilan program tersebut tentu terdapat strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan program sehingga program dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan potensi alam serta masyarakat serta berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Hal ini terlihat dari keadaan masyarakat Desa Kemiri dan pada awalnya hanya bekerja sebagai buruh perkebunan dan mengelolan lahan hutan tidak dengan melihat kelestarian lingkungan, dan sekarang keadaan masyarakat terlihat lebih sejahtera yang ditunjukkan dari tempat tinggal mereka yang lebih layak serta cara pengolahan hasil panen dari pengelolaan hutan terutama hasil tanaman kopi mereka telah memiliki alat-alat pengolah kopi yang termasuk teknologi dan cara pengolahan terbaru serta dalam pengolahan hasil tersebut tetap mengendepankan kelestarian lingkungan sekitar mereka untuk mewujudkan hal demikian tentunya diperlukan suatu strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Menurut Purwanto (2012, hal. 16) menjelaskan strategi adalah sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan, penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komperatif, sinergis yang ideal berkelanjutan, sebagai arah, cakupan, dan prespektif jangka panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organisasi.

Oleh karena hal tersebut melalui kajian ini nantinya akan terdeskripsikan apa saja strategi yang dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut sehingga terlaksana dan memberikan manfaat terhadap masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan memahami strategi yang dilakukan LMDH “Taman Putri” dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Petani Kopi yang menggunakan lahan Hutan Lindung sebagai lahan perkebunannya haruslah tidak hanya memikirkan keuntungan semata bagi dirinya sendiri dalam memanfaatkan sumberdaya alam, tetapi juga harus memikirkan dampak kelestarian Hutan Lindung tersebut sehingga dalam pengelolaan lahanya tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. LMDH “Taman Putri” hadir sebagai lembaga yang membimbing para petani dalam mengubah persepsi dan cara berfikir sehingga menanamkan dalam dirinya bahwa pemanfaatan sumberdaya alam dapat berjalan beriringan dengan sekaligus tetap melestarikannya. Selain hal tersebut terbentuknya organisasi ini di dalam terlaksananya Program PHBM memberikan manfaat yang lebih terhadap peningkatan kesejahteraan petani yang menjadi anggotanya dengan terlaksananya program-program pemberdayaan seperti pelatihan dan penyuluhan terhadap petani tentang bagaimana memaksimalkan hasil tani yang mereka tanam serta terdapat pula program-program bantuan bibit dari stakeholder dari lembaga ini, sehingga dengan meningkatnya kualitas hasil tani maka daya jualnya pun meningkat dan pada akhirnya kesejahteraan petani meningkat pula.

Subbab sebelumnya telah menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” sudah dapat dikatakan pelaksanaan program yang berhasil dalam hal ini adalah program PHBM dari pihak Perhutani, dimana dari keadaan tidak berdaya kepada keadaan masyarakat yang berdaya. Program PHBM pastinya tidak dengan mudah LMDH mengarahkan para petani kopi

untuk berpartisipasi aktif dan mengubah pola pikir mereka tentang penanaman di lahan hutan yang secara bersamaan tidak merusak lingkungan hutan pula, sehingga dibutuhkan strategi yang tepat dalam pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut, “Bagaimana Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di uraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, menjelaskan tentang Strategi Pemberdayan Masyarakat Petani Kopi yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember dari keberhasilan program pemberdayaan yang dilakukan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian dengan judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi pada LMDH “Taman Putri” di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember” diharap akan memberikan manfaat, diantaranya sebagai :

1. Mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
2. Menjadi bahan informasi dan kajian bagi masyarakat tentang strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri”.
3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu sosial, serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian sejenis.
4. Sebagai referensi untuk Perhutani dalam pengembangan strategi Program pemberdayaan PHBM dan peningkatan kualitas LMDH yang sudah terbentuk.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Snelbecker dalam Moleong (2014:57) mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi yaitu mengikuti aluran tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang diamati dan teori berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Oleh karena itu kegiatan penelitian membutuhkan kerangka pemikiran yang utuh untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan dalam perumusan masalah. Unsur yang besar peranannya dalam hal ini adalah konsep dan teori.

Dewasa ini deforestasi dan degradasi hutan masih menjadi masalah krusial yang dihadapi sektor kehutanan Indonesia saat ini. Laju deforestasi dan degradasi selama periode 2003 – 2008 mencapai 0,9 juta ha/tahun (Dephut, 2009). Banyak faktor yang memicu terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, diantaranya adalah kondisi sosial/kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan yang relatif masih rendah, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan. Kerusakan hutan yang semakin parah diiringi pula oleh penurunan potensi atau *standing stock* kayu hutan alam. Jika dibiarkan terus menerus, hal ini akan mengancam keberlanjutan Pembangunan sektor kehutanan. Di Indonesia, kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan tersebut diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007, dimana perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kondisi sumberdaya hutan yang semakin menurun dan kemiskinan masyarakat sekitar hutan yang meningkat mendorong semakin menguatnya pendekatan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat atau kehutanan masyarakat (*social forestry*). Hal ini sejalan dengan arah pengelolaan hutan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa pengelolaan hutan dari sisi fungsi produksinya diarahkan menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada

pemberdayaan masyarakat. Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/MENHUT-II/2004 disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau di sekitar hutan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan hutan dalam rangka *social forestry*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari. Terdapat dua hal yang perlu digarisbawahi yaitu adanya peluang yang semakin besar bagi masyarakat untuk mengelola sumberdaya hutan, dan perlunya kemampuan masyarakat yang memadai dalam rangka mengelola sumberdaya hutan untuk pemenuhan kebutuhannya. Pendekatan kehutanan masyarakat memandang masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Sebagai pelaku utama, masyarakat harus mampu mengendalikan pembuatan keputusan tentang pengelolaan sumberdaya hutan. Kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan. Sehingga masyarakat mampu memerankan fungsinya secara optimal. Namun demikian kondisi masyarakat sekitar hutan yang masih berada dalam kemiskinan dan masih terbatasnya akses terhadap sumberdaya hutan merupakan indikator kurangnya kemampuan mereka dalam pengelolaan sumberdaya di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhannya.

Program *Social Forestry* dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh perhutani yaitu dilaksanakannya program kemitraan dan pemberdayaan dan diimplementasikan dalam bentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dicanangkan oleh Perum Perhutani pada tahun 2001 membuka kesempatan bagi masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. PHBM merupakan bentuk sinergi dari Perhutani selaku lembaga bisnis milik pemerintah dengan masyarakat desa hutan untuk tujuan optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan secara progresif dan proporsional. Selain untuk kepentingan bisnis, keberadaan PHBM berfungsi untuk menjaga konservasi lingkungan hutan serta mempertahankan eksistensi sosial ekonomi masyarakat desa hutan (Herawaty, 2013).

Rahmina (2011) memperjelas bahwa Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan sebuah istilah untuk berbagai konsep pengelolaan hutan. Pengembangan PHBM didasarkan pada kondisi lokal, tradisi dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Hal itu menyebabkan munculnya berbagai varian skema PHBM seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat dan lain-lain. Meski demikian berbagai skema tersebut mempunyai ciri penting yang sama yakni PHBM harus didasarkan akses yang legal dan pasti bagi masyarakat terhadap sumberdaya hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang didasarkan pada struktur sosial dan kondisi lokal. Sehingga Program PHBM merupakan alat untuk desentralisasi pengelolaan yang menjadi bagian dari konsep tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dan merupakan salah satu pilar penting terwujudnya pengelolaan hutan lestari.

Kemitraan yang terlaksana dengan masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat diimplementasikan dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang digunakan sebagai wadah resmi masyarakat untuk bekerjasama dan berkomunikasi dengan Perum Perhutani. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya (Awang, San A. Dkk : 2008). LMDH ini yang melakukan proses pemberdayaan kepada masyarakat sekitar hutan dengan cara melakukan kolaborasi dengan stakeholder yang ada sehingga kemampuan dan pengetahuan terhadap pengelolaan hutan lebih mengutamakan kelestariannya serta tetap dapat meningkatkan keadaan ekonomi mereka menuju keadaan sejahtera.

Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat melalui program pemberdayaan ini tidak lain dikarenakan strategi pemberdayaan yang tepat yang dilakukan oleh LMDH tersebut. Strategi pemberdayaan yang dilakukan termasuk dalam pemberdayaan mezzo (dilakukan dengan menggunakan kelompok),

pemberdayaan ini dilakukan kepada sekelompok klien. Adapun bentuk strategi penerapannya melalui pelatihan, forum. Pendidikan dan pelatihan, dan dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam peningkatan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya (Huraerah 2011:106 dan Fahrudin 2008: 19).

Menurut Bambang (2012), Identifikasi potensi wilayah yang akan dilaksanakan pengembangan dan pemberdayaan menjadi sangat penting selain sarana prasarana yang dibutuhkan. Karena akan menentukan program apa yang akan di terapkan disana, metode dan materi apa yang diperlukan agar sesuai dengan karekeristik budaya dan keinginan daripada masyarakat setempat. Penyuluhan pemberdayaan kehutanan harus berperan aktif dalam memfasilitasi terbentuknya dan penguatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman masyarakat betapa penting kelompok / kelembagaan yang kuat. Pada akhirnya akan tumbuh kesepakatan, kerjasama dan jaring kerja antara masyarakat itu sendiri di dalam kelompok / lembaga. Dalam upaya pengembangan kelembagaan haruslah tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, bukan kelembagaan yang terbentuk untuk kepentingan instansi pembina. Terbentuknya dan berkembangnya kelompok/ lembaga masyarakat yang kuat dapat terlihat dengan terbentuknya kelompok tani hutan dengan sumber daya anggota yang mantap, memiliki pengurus serta mempunyai tujuan yang jelas dan tertulis, dan mempunyai kemampuan managerial, kesepakatan dan aturan yang ditaati bersama.

Oleh karena hal tersebut di atas pembangunan sektor hutan memiliki peran penting dalam proses pengembalian lingkungan hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, seperti dalam penelitian ini yang telah dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam proses pengelolaan hutan serta melakukan penjagaan hutan sehingga lingkungan hutan tetap lestari dengan tetap memberikan manfaat kepada masyarakat dengan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pengelolaan hutan tersebut yang merupakan

hasil dari program kemitraan pihak Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan lindung. Dalam pelaksanaannya tidak pernah lepas dari proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar hutan , pengelolaan lingkungan hutan, strategi pemberdayaan, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, serta sesuai panduan dasar pelaksanaan program sosial forestry dalam hal ini adalah Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), untuk mencapai keadaan sejahtera bagi semua stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan proses pengelolaan lingkungan hutan.

### **2.1 Konsep Masyarakat Sekitar Hutan**

Mansyur (1977:22) menyatakan, masyarakat sebagai wadah hidup bersama dari individu-individu yang terjalin dan terikat dalam hubungan interaksi serta interelasi sosial, dalam suatu masyarakat terdapat unsur-unsur di dalamnya, unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Harus ada perkumpulan manusia dan jumlahnya banyak
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu lama di suatu daerah tertentu
- c. Adanya aturan yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Koentjaraningrat (1991:160) merumuskan definisi masyarakat sebagai berikut: masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa antara individu terikat suatu sistem adat istiadat yang wajib dijalani sebagai identitas bersama. Norma dalam masyarakat harus dijalani agar tercipta suatu keteraturan sosial. Kehidupan bermasyarakat tentunya tidak terlepas dari keterikatan untuk bertindak laku sesuai dengan norma dalam lingkungan sosial. Pada dasarnya norma-norma dalam masyarakat yang mengarahkan pada tingkah laku dan perbuatan manusia kearah kebaikan.

Definisi masyarakat yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, maka Soekanto (2002:82) mengungkapkan ciri-ciri masyarakat dalam suatu bentuk kehidupan bersama adalah sebagai berikut:

- a) Manusia yang hidup bersama, dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada, tetapi secara teoritis angka minimumnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- b) Bercampur untuk waktu yang cukup lama, hidup bersama dengan jangka waktu yang lama akan menimbulkan sistem komunikasi dan timbul peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
- c) Masyarakat merupakan suatu kesatuan,
- d) Masyarakat merupakan suatu sistem hidup bersama, sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Secara ringkas, kumpulan individu dapat disebut sebagai masyarakat jika telah memenuhi empat syarat utama. Pertama, dalam kumpulan manusia harus ada ikatan perasaan dan kepentingan. Kedua, mempunyai tempat tinggal atas daerah yang sama atau mempunyai kesatuan ciri kelompok tertentu. Ketiga, hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama. Keempat, dalam kehidupan bersama terdapat aturan-aturan atau hukum yang mengatur perilaku mereka dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama, dengan demikian masyarakat bukan sekedar kumpulan manusia tanpa ikatan, tetapi terdapat hubungan fungsional antara satu sama lainnya.

Istilah yang digunakan dalam bidang kehutanan untuk merujuk orang-orang yang tinggal di dalam dan atau di sekitar hutan kebanyakan adalah istilah "masyarakat", dan sangat jarang digunakan istilah "komunitas". Hal ini bisa dilihat dalam berbagai pustaka dan dokumen yang kebanyakan menggunakan istilah "masyarakat". Beberapa istilah yang digunakan diantaranya yaitu : masyarakat, masyarakat desa hutan, masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, masyarakat di sekitar hutan, masyarakat lokal, dan masyarakat setempat. Menurut

Winarto (2006) yang mengumpulkan berbagai definisi dan istilah dari peraturan-peraturan bidang kehutanan, beberapa istilah dan definisi yang berkaitan dengan masyarakat sekitar hutan adalah sebagai berikut :

- a) Masyarakat adalah kelompok orang warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas, yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan, mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya.
- b) Masyarakat desa hutan adalah kelompok masyarakat setempat, terutama masyarakat tradisional, baik yang berada di dalam hutan maupun di pedesaan sekitar hutan.
- c) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan adalah kelompok-kelompok masyarakat baik yang berada di dalam hutan maupun di pedesaan sekitar hutan.
- d) Masyarakat di sekitar hutan adalah masyarakat setempat terutama masyarakat yang dalam bersikap, berpikir dan bertindak selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun.
- e) Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat di dalam suatu kawasan geografis tertentu, mencakup kelompok asli dan kelompok tradisional, dan juga kelompok pendatang yang melakukan pemukiman swakarsa.

Istilah lainnya yaitu ”masyarakat setempat” yang menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/MENHUT-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di dalam dan di sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial didasarkan pada mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan. Berkaitan dengan penelitian ini pengertian masyarakat hutan merupakan obyek penelitiannya sehingga penjelasan tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di dalam LMDH “Taman Putri” di Desa

Kemiri ini tidak meluas ke arah obyek penelitian lainya dan berfokus pada masyarakat yang tergolong dalam konsep masyarakat sekitar hutan.

## 2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Sekitar hutan

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di daerah sekitar hutan tidak dapat dipisahkan dari konsep pemberdayaan masyarakat yang menggunakan prespektif ekologis (*ecological prespective*). Prespektif ekologis muncul dari kritik kelompok pecinta lingkungan terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang dianggap kurang peduli terhadap krisis lingkungan, sedangkan pada umumnya pemberdayaan masyarakat lebih mementingkan ketiga aspek tersebut dalam proses pelaksanaannya (Zubaedi, 2013;6-7). Hal tersebut dikarenakan dalam proses pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan asas pemberdayaan, manusia ditempatkan sebagai pusat perhatian, beserta hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif serta serasi dan selaras dengan lingkungan alam sekitar, serta menekankan hak pembangunan yang disertai kewajiban memenuhi kebutuhan akan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang secara seimbang ( Purba, 2005; 10-11). Kawasan lingkungan yang dapat menjadi salah satu perhatian adalah kawasan hutan, karena hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat dan pemabangunan berkelanjutan, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat, pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

Masyarakat yang perlu mendapatkan sentuhan pembangunan kehutanan melalui pemberdayaan masyarakat tentunya di fokuskan pada penduduk yang kehidupannya bergantung pada sumberdaya hutan di dalam kawasan Perhutani, agar mereka dapat mengakses informasi, teknologi, modal dan pasar. Dan sekaligus termasuk dalam

pembangunan Perhutani itu sendiri, sehingga masyarakat ini dapat hidup lebih maju bisa berserikat secara berlembaga (berkelompok) menjadi Kelompok Tani Hutan (KTH), hingga dapat berusaha secara mandiri. Dalam proses pemberdayaan masyarakat ini didampingi oleh penyuluh kehutanan yang masuk dalam wilayah kerjanya, sehingga proses peningkatan kemampuan dan kemandirian agar masyarakat mampu dan memiliki kekuatan dalam memecahkan masalahnya sendiri dapat terawasi dengan baik. Banyak program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kehutan untuk menyentuh lebih dalam masyarakat di dalam kawasan hutan KPH yaitu antara lain : Hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Demplot Penyuluhan, Kemitraan, Kelompok Usaha Produktif (KUP), Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) dan sebagainya. Program-program tersebut dapat menjadi sarana pencapaian tujuan pengembangan masyarakat sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada kawasan sekitar hutan dapat tercapai ([www.bp2sdm.menlhk.go.id](http://www.bp2sdm.menlhk.go.id) , diakses tanggal 27 Februari 2017).

Menurut Bambang (2012), Identifikasi potensi wilayah yang akan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan menjadi sangat penting selain sarana prasarana yang dibutuhkan. Karena akan menentukan program apa yang akan di terapkan disana, metode dan materi apa yang diperlukan agar sesuai dengan karekteristik budaya dan keinginan daripada masyarakat setempat. Penyuluhan pemberdayaan kehutanan harus berperan aktif dalam memfasilitasi terbentuknya dan penguatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman masyarakat betapa penting kelompok / kelembagaan yang kuat. Pada akhirnya akan tumbuh kesepakatan, kerjasama dan jaring kerja antara masyarakat itu sendiri di dalam kelompok / lembaga. Dalam upaya pengembangan kelembagaan haruslah tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, bukan kelembagaan yang terbentuk untuk kepentingan instansi pembina. Terbentuknya dan berkembangnya kelompok/ lembaga masyarakat yang kuat dapat terlihat dengan terbentuknya kelompok tani hutan dengan sumber daya anggota yang mantap, memiliki pengurus serta mempunyai tujuan yang

jelas dan tertulis, dan mempunyai kemampuan managerial, kesepakatan dan aturan yang ditaati bersama.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pula telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya hutan adalah berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Penyelenggaraan kehutanan tersebut bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Poin tersebut sangat menjelaskan bahwa porsi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan menempati posisi yang sangat penting karena setiap aspek yang ada di dalam hutan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Salah satu program yang dapat menjadi tolak ukur keterkaitan tersebut adalah *Social Forestry* Program Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan untuk penjelasannya akan di bahas di sub bab selanjutnya.

### **2.3 Konsep *Social Forestry* Program Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)**

*Social Forestry* merupakan pembaharuan bentuk dan system pengelolaan hutan dengan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak dan menjadi payung dari lima kebijakan prioritas program Kementerian Kehutanan yaitu, pemberantasan penebangan liar, penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan dan penguatan desentralisasi kehutanan. Bahkan berbagai pihak yang mendukung *social forestry* mengharapkan agar *social forestry* tidak hanya merupakan payung, tetapi juga dijadikan jiwa pengelolaan hutan baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. *Social forestry* dilaksanakan baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan.

Di dalam kawasan hutan dilakukan melalui kegiatan hutan kemasyarakatan (*Social forestry*), PMDH (Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan), PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), hutan tanaman rakyat (HTR), dll. Sedangkan di luar kawasan dilakukan melalui pengembangan hutan rakyat. (Hakim, dkk., 2010)

Program *social forestry* atau perhutanan sosial telah dikembangkan sejak tahun 1984. Pada perkembangannya, keberhasilan program *social forestry* sangat bergantung pada banyak faktor diantaranya adalah kondisi biofisik lahan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Artinya, model *social forestry* di satu lokasi belum tentu sesuai atau cocok untuk lokasi lain. Oleh karena itu diperlukan penelitian/kajian tentang berbagai alternatif model *social forestry* yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik lokasinya. Dalam pengelolaan hutan di KPH Perhutani Jember tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat. Pola kemitraan menjadi bagian yang sangat penting, mulai dari kegiatan persiapan tanaman, pemeliharaan hingga kegiatan produksi. Kemitraan dan Pengembangan tersebut diimplementasikan dalam bentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dicanangkan oleh Perum Perhutani pada tahun 2001 membuka kesempatan bagi masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. PHBM merupakan bentuk sinergi dari Perhutani selaku lembaga bisnis milik pemerintah dengan masyarakat desa hutan untuk tujuan optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan secara progresif dan proporsional. Selain untuk kepentingan bisnis, keberadaan PHBM berfungsi untuk menjaga konservasi lingkungan hutan serta mempertahankan eksistensi sosial ekonomi masyarakat desa hutan (Herawaty, 2013).

Program PHBM ditujukan agar terwujud pengelolaan yang mengakomodir sinergisitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada awalnya program ini diharapkan menggunakan manajemen yang menjamin keberlanjutan atau disebut sebagai *sustainable forest management*. Keberlanjutan yang dimaksud merupakan terjemahan dari upaya yang menjamin adanya adaptasi sistem pengetahuan dan

teknologi modern, dengan sistem pengetahuan dan teknologi lokal/tradisional yang turut menampung kepentingan-kepentingan masyarakat desa hutan yang sebagian besar diisi profesi sebagai petani (Handoko, dkk., 2009).

Karakteristik social masyarakat serta jenis hutan yang menjadi obyek program pemberdayaan menjadi penentu jenis pemberdayaan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program PHBM ini , berkaitan hal ini Rahmina (2011) menyatakan bahwa:

“Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan sebuah istilah untuk berbagai konsep pengelolaan hutan. Pengembangan PHBM didasarkan pada kondisi lokal, tradisi dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Hal itu menyebabkan munculnya berbagai varian skema PHBM seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat dan lain-lain. Meski demikian berbagai skema tersebut mempunyai ciri penting yang sama yakni PHBM harus didasarkan akses yang legal dan pasti bagi masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Hutan dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan masyarakat mengambil keputusan bagaimana mengelola sumberdaya mereka. Selanjutnya konsep PHBM juga mendukung masyarakat untuk memperoleh hak atas sumberdaya yang merupakan bagian penting dalam hidup mereka. PHBM merupakan alat untuk desentralisasi pengelolaan yang menjadi bagian dari konsep tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dan merupakan salah satu pilar penting terwujudnya pengelolaan hutan lestari.”

Diketahui bahwa Secara umum, negara memandang hutan dari dua segi yakni status dan fungsinya. Status merujuk pada status kepemilikan hutan. Dari sisi statusnya dapat diketahui kepemilikan dari suatu kawasan hutan. Sedangkan fungsi hutan melihat hutan dari manfaat dan perannya bagi kehidupan. Fungsi hutan ini lebih terkait dengan bagaimana hutan tersebut dikelola. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sekarang dikenal tiga pengertian hutan berdasarkan statusnya, yaitu:

#### a. Hutan negara

Hutan negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara ini kepemilikannya ada pada negara. Segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus sejjin dari negara.

#### b. Hutan hak

Hutan hak merupakan hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah, dalam terminologi undang-undang kehutanan sebelumnya disebut hutan milik. Kepemilikan hutan hak ini bisa ditangan individu atau badan hukum.

#### c. Hutan adat

Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Hingga tulisan ini dibuat belum ada penjelasan secara rinci apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat, apakah individu, badan hukum atau kelompok masyarakat.

Selain hal tersebut di atas hutan memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Keberadaan dan kelangsungan hutan perlu dijaga semua elemen masyarakat. Atas dasar itu, perlu pengaturan yang baik dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Berikut ini pengertian hutan dilihat dari fungsinya.

#### a. Hutan lindung

Hutan lindung adalah hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor, dan bencana ekologis lainnya. Misalnya untuk melindungi fungsi daerah aliran sungai, maka suatu wilayah ditetapkan sebagai hutan lindung. Secara teknis lokasinya bisa di kawasan hutan produksi atau tempat-tempat lainnya. Selama keberadaannya dianggap penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan maka kawasan tersebut bisa ditetapkan sebagai hutan lindung. Lihat lebih lanjut tentang hutan lindung.

#### b. Hutan konservasi

Hutan konservasi adalah hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Hutan konservasi di bagi ke dalam dua golongan yakni kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kedua pengertian hutan ini sama-sama memiliki fungsi pengawtean keanekaragaman satwa, tumbuhan dan ekosistemnya. Hanya saja pada kawasan pelestarian alam diikuti kata pemanfaatan secara lestari sumberdaya tersebut. Lihat lebih lanjut tentang hutan konservasi.

- Kawasan suaka alam, fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya.
  - Cagar alam adalah kawasan hutan yang dilindungi karena memiliki keanekaragaman hayati dan memiliki ekosistem khas yang tumbuh secara alami. Biasanya kawasan cagar alam tidak terlalu luas.
  - Suaka margasatwa adalah kawasan hutan yang dilindungi karena menjadi tempat hidup satwa khas atau memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi.
- Kawasan pelestarian alam, fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. Sumberdaya alam tersebut bisa dimanfaatkan secara lestari.
  - Taman nasional adalah kawasan hutan yang luas diperuntukan bagi pengawetan keanekaragaman hayati dan perlindungan alam. Kawasan ini memiliki fungsi yang lengkap, meliputi fungsi-fungsi jenis hutan konservasi lainnya. Biasanya terbagi dalam beberapa zona, diantaranya zona inti, zona pemanfaatan dan zona-zona lain yang diatur secara khusus.
  - Taman hutan raya adalah kawasan hutan yang ditujukan untuk pengawetan keanekaragaman hayati dan perlindungan alam.

Pepohonan dan satwa yang ada di dalamnya bisa asli ataupun didatangkan dari luar kawasan. Fungsinya mirip dengan kebun raya.

- Taman wisata alam adalah hutan yang ditujukan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi alam.
- Taman buru

Taman buru merupakan hutan yang selain mempunyai fungsi konservasi juga ditujukan untuk mengakomodir hobi atau kegiatan perburuan. Pengertian hutan ini mungkin tidak begitu familiar di masyarakat. Dari sisi jumlah dan luasnya pun tidak sebesar jenis-jenis hutan lainnya. Meskipun di negara lain yang memiliki tradisi rekreasi berburu, taman buru menjadi andalan untuk meraih devisa di sektor pariwisata.

#### c. Hutan produksi

Hutan produksi adalah hutan yang bisa dimanfaatkan untuk dieksploitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non kayu. Ada berbagai jenis hutan produksi seperti HPH, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan tipe-tipe lainnya (Cecep Risnandar ; <https://jurnalbumi.com/blog/pengertian-hutan-menurut-undang-undang/>, di akses 25 oktober 2017 1:25 PM)

Keadaan social masyarakat serta jenis hutan yang menjadi pertimbangan pelaksanaan Program PHBM ini memberikan langkah pada program ini untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan lainnya sebagai bentuk kemitraan dan pemberdayaan yang merupakan pola dalam pengelolaan hutan KPH Perhutani Jember. Kemitraan yang terlaksana dengan masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat diimplementasikan dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang digunakan sebagai wadah resmi masyarakat untuk bekerjasama dan berkomunikasi dengan Perum Perhutani. Anggota yang tergabung dalam wadah ini adalah masyarakat desa hutan yang menempati kawasan hutan KPH Perhutani tersebut. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem PHBM. LMDH merupakan

lembaga yang berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa dimana LMDH itu berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, LMDH mempunyai aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). (Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) , 2007)

Berdasarkan Buku Panduan Pengembangan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2008, Masyarakat (*community*) adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu tempat tertentu, yang terikat dalam suatu norma, nilai dan kebiasaan yang disepakati bersama oleh kelompok yang bersangkutan. Berdasarkan pada tipologinya, masyarakat desa hutan adalah masyarakat yang mendiami wilayah yang berada di sekitar atau di dalam hutan dan mata pencaharian/pekerjaan masyarakatnya tergantung pada interaksi terhadap hutan. Lembaga adalah wadah dimana sekumpulan orang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan bersama, dan yang berfungsi mengatur akan kebutuhan bersama tersebut dengan nilai dan aturan bersama. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pihak yang terlibat dalam proses pengembangan lembaga masyarakat desa hutan ini adalah: seluruh anggota dan pengurus dari LMDH, pemerintah daerah (desa sampai kabupaten), pihak yang terkait sesuai dengan kebutuhan (dinas/instansi terkait), pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan lembaga (investor, perguruan tinggi, LSM), dan fasilitator yang dapat dipilih dari masyarakat sendiri atau pihak luar. Di dalam Buku Panduan Pelaksanaannya seluruh anggota LMDH memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan terhadap LMDH itu sendiri yang dinamakan *Outbound Management Training* (OMT) atau pelatihan manajemen lembaga adalah satu bentuk pelatihan untuk mengetahui pemahaman peserta tentang manajemen organisasi. OMT

dilakukan dalam berbagai permainan yang memuat nilai atau aspek dalam manajemen lembaga. OMT menjadi penggambaran aktivitas pengelolaan lembaga dan dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan individu atau kemampuan rata-rata kelompok yang mengikutinya. (Awang, San A. Dkk : 2008)

Pada proses pelaksanaan Program PHBM di lingkungan masyarakat yang pada dasarnya dikelola oleh anggota LMDH perlu dilakukan pengembangan sehingga jika ada kekurangan dalam pelaksanaan program waktu sebelumnya dapat diperbaiki, oleh karena itu LMDH itu sendiri perlu pengembangan yang memiliki beberapa tujuan dan manfaat tertentu yaitu, tujuan pengembangan LMDH adalah: 1) untuk meningkatkan kemampuan LMDH dalam pengelolaan lembaganya, 2) pengenalan pendekatan partisipatif dalam rangka pengembangan lembaga, 3) memberikan pandangan yang berbeda dan kritis dalam rangka pengembangan lembaga masyarakat, dan 4) memberikan panduan sederhana namun bermutu dalam rangka pengembangan lembaga masyarakat. Manfaat Pengembangan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan adanya panduan dalam pengembangan LMDH, untuk menghasilkan peningkatan kemampuan lembaga dalam pengelolaan lembaga secara tunggal maupun kolektif, serta mendorong lembaga untuk memiliki kekuatan dalam menghadapi dan berinteraksi dengan pihak luar, baik dalam daya dukung maupun dalam daya saing (Awang, San A. Dkk : 2008).

Pengembangan lembaga diawali dengan pertemuan multi pihak di tingkat desa untuk menentukan kriteria siapa pelaku atau masyarakat pengguna hutan. Penentuan masyarakat pengguna hutan menggunakan kriteria yang telah disepakati bersama. Penentuan kriteria bisa jadi bersifat subjektif dan tidak lepas dari kepentingan, namun hal itu penting dirumuskan secara bersama. Oleh karena itu proses pertama penentuan masyarakat pengguna hutan menjadi penting untuk disimak, karena proses awal ini lah yang akan menentukan kelompok masyarakat mana yang akan mengikuti/terlibat dalam proses-proses selanjutnya. Langkah kedua dari panduan ini menekankan pada metode pendekatan yang digunakan, yaitu pengenalan Pendekatan Aksi Partisipatif (PAP). PAP menunjukkan adanya hubungan interaksi aktif diantara masyarakat yang

difasilitasi oleh fasilitator untuk melakukan tindakan/aksi dalam sebuah proses. Pengenalan pada PAP ini sangat berguna dalam proses memahami dan membangun kebersamaan. Pemahaman yang sama akan menghasilkan sebuah kesadaran dan keterlibatan yang tidak dipaksakan (Awang, San A. dkk : 2008).

#### **2.4 Konsep Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Purwanto (2012, hal. 16), strategi adalah sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan, penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komperatif, sinergis yang ideal berkelanjutan, sebagai arah, cakupan, dan prespektif jangka panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organisasi. Pemberdayaan memiliki konsep tersendiri yaitu sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuann dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005:57-60). Dari konsep tersebut dapat ditarik garis besar bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat serta membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata sehingga menjadi lebih berdaya dalam kehidupannya (Zubaedi, 2013: 24).

Pemberdayaan sebagai suatu upaya memampukan dan memandirikan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato (2012: 29-31) dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

“*Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), sebab setiap masyarakat diyakini memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Bukan hanya penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban. *Ketiga*, melindungi yang bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, dan membuat masyarakat semakin bergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) tetapi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah”.

Terkait hal tersebut di atas tujuan Pemberdayaan selalu terkait dengan terwujudnya perbaikan yang berkelanjutan, seperti halnya yang disampaikan World Bank dalam Mardikanto dan Soebianto (2012: 110) mensyaratkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan (*sustainable deveopment*) menyangkut:

“(1) perbaikan modal finansial, berupa perencanaan ekonomi makro dan pengelolaan fiskal; (2) perbaikan modal fisik, berupa prasarana, bangunan, mesin, dan juga pelabuhan; (3) perbaikan modal SDM, berupa perbaikan kesehatan dan pendidikan yang relevan dengan pasar kerja; (4) pengembangan modal sosial, yang menyangkut; ketrampilan dan kemampuan masyarakat, kelembagaan, dan norma hubungan sosial yang lain; (5) pengelolaan sumberdaya alam, baik yang bersifat komersial maupun non komersial bagi perbaikan kehidupan manusia termasuk; air-bersih, energi, serat, pengelolaan limbah, stabilitas iklim, dan beragam layanan penunjang”.

Dalam konteks pekerjaan sosial, Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga jenis Pemberdayaan, yaitu Pemberdayaan mikro, mezzo, dan makro. Pemberdayaan

mikro (dilakukan secara individu) pendekatan ini dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, stress management, pembinaan dan crisis intervension. Tujuannya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya, mengurangi tekanan, menumbuhkan kesadaran akan kemampuan dan kelemahan dirinya. Pemberdayaan makro (strategi sistem besar dengan sasaran yang lebih luas), pendekatan ini juga disebut dengan strategi sistem besar karena sasaran perubahannya diarahkan pada lingkungan yang lebih luas seperti masyarakat secara keseluruhan dan segala lapisan. Adapun macam-macam strateginya yaitu: kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, kampanye dan pengorganisasian masyarakat serta management konflik. Pemberdayaan mezzo (dilakukan dengan menggunakan kelompok), pemberdayaan ini dilakukan kepada sekelompok klien. Adapun bentuk strategi penerapannya melalui pelatihan, forum. Pemberdayaan yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” merupakan pemberdayaan mezzo karena dalam pelaksanaannya dilakukan terhadap sekelompok klien dan menggunakan kelompok tersebut sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dan dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam peningkatan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya (Huraerah 2011:106 dan Fahrudin 2008: 19).

## **2.5 Konsep Strategi Pengorganisasian ,Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas**

Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat memiliki pengertian sedikit berbeda dengan Pengembangan masyarakat, menurut Murray G Ross Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah suatu proses ketika suatu masyarakat berusaha menentukan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuannya, mengatur atau menyusun, mengembangkan kepercayaan dan hasrat untuk memenuhinya, menentukan sumber-sumber (dari dalam dan atau dari luar masyarakat), mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya tersebut. Teori ini memberikan penjelasan bahwa pelaku

utama dalam proses pencapaian tujuan proses ini adalah masyarakat itu sendiri dengan terus mengembangkan diri secara bersama sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka pada saat itu. (Huraerah, 2011:143-144)

Secara umum komunitas dapat diartikan sebagai kumpulan individu (bisa juga dalam bentuk kelompok) yang masih memiliki tingkat kepedulian dan interaksi antar anggota masyarakat yang menempati suatu wilayah yang relatif kecil (lokalitas) dengan batas-batas yang jelas (Nasdian, 2014, hal 62). Sedangkan menurut Kenny (2007, hal 47) pengertian komunitas dapat dipahami secara deskriptif dan normatif. Secara deskriptif pengertian komunitas merujuk kepada sekelompok orang yang di dalamnya terdiri dari individu-individu yang memiliki perasaan sebagai bagian dari jaringan komunitas tersebut, dilandasi dengan ikatan solidaritas, kepercayaan dan keamanan bersama. Secara normatif, komunitas dapat menunjukkan adanya kepentingan untuk berbagi dan bekerja sama di dalam segala aspek kehidupan manusia. Peran normatif ini berlangsung secara terus menerus karena pada ruang ini tatanan normatif dalam komunitas dapat berkembang menjadi sebuah ideologi bersama. Ideologi bersama dalam komunitas dapat digunakan untuk menyamakan adanya konflik kepentingan. Berkaitan dengan penelitian ini komunitas yang dimaksud adalah para petani kopi yang telah tergabung dalam kelompok petani kopi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengelola lahan hutan lindung sebagai tempat bercocok tanam mereka dan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Andreas dalam Huraerah (2011: 155-156) membagi pengembangan masyarakat menjadi empat tahapan, dalam setiap tahap kegiatan disertai dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan dan ketrampilan-ketrampilan yang harus dikuasai oleh para petugas pengembang masyarakat dalam melaksanakan praktek pengembangan masyarakat. Keempat tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Pertama: Identifikasi dan penyebaran informasi/ masalah

Tahapan ini merupakan tahap ketika kebutuhan-kebutuhan nyata ditentukan dari kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan, masalah-masalah diidentifikasi dan

ianalisa, hubungan-hubungan dikembangkan, hubungan-hubungan baik dimantapkan, interaksi tatap muka dengan masyarakat dilakukan, sehingga berbagai pendapat diperoleh dan informasi disebarluaskan.

## 2. Tahapan Kedua: Mobilisasi masyarakat/komunitas

Dalam tahapan ini masyarakat distimulasi untuk datang bersama-sama guna mendiskusikan masalah-masalah dan dianalisa bersama, tujuan-tujuan, rencana aksi disusun dan diimplementasikan, pemimpin-pemimpin potensial diidentifikasi dan pekerjaan panitia distimulasi.

## 3. Tahapan Ketiga: Pengorganisasian

Tahapan ini adalah penggabungan kekuatan membangun dari manusia, material, mesin dan uang, sehingga mereka dapat bekerja bersama dengan cara yang tertib guna menghasilkan barang untuk keuntungan atau pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## 4. Tahapan Keempat: Pendidikan

Tahapan ini adalah tahap di saat anggota masyarakat dilatih untuk menerima tanggung jawab terhadap organisasi mereka serta untuk memperoleh ketrampilan dan tehnik organisasi yang penting guna memelihara organisasi tersebut.

Tahapan proses pengembangan masyarakat tersebut dapat pula dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Model Tahapan Dasar Pekerjaan Pengembangan Masyarakat

Tahapan	Tugas-Tugas	Keterampilan
A. Identifikasi dan Penyebaran Informasi/ Isu/ Masalah	1. Menentukan kebutuhan-kebutuhan nyata dari kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan	1. Keterampilan-ketrampilan pengumpulan data
	2. Mendefinisikan dan menganalisa masalah-	2. Keterampilan-ketrampilan identifikasi

Tahapan	Tugas-Tugas	Keterampilan
	masalah	dan analisa masalah
	3. Mengembangkan hubungan-hubungan baik ( <i>rapport</i> ), interaksi tatap muka dengan masyarakat	3. Keterampilan-ketrampilan interaksional
	4. Berkunjung ( <i>legwork</i> ) untuk memperoleh pendapat-pendapat dan penyebaran informasi	
B. Mobilisasi Masyarakat/ Komunitas	1. Menstimulasi masyarakat untuk datang bersa guna mendiskusikan masalah-masalah, pertemuan-pertemuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah	1. Keterampilan pengumpulan data
	2. Menganalisa masalah bersama masyarakat	2. Keterampilan identifikasi dan analisa masalah
	3. Menyusun tujuan-tujuan, rencana aksi dan implementasi	3. Keterampilan-keterampilan interaksional
	4. Mengidentifikasi pemimpin-pemimpin potensial	

Tahapan	Tugas-Tugas	Keterampilan
	5. Menstimulasi pekerjaan panitia	
C. Pengorganisasian	1. Membangun organisasi, struktur-struktur formal dan kepemimpinan	1. Keterampilan-keterampilan informal
		2. Keterampilan-keterampilan organisasional
		3. Keterampilan-keampilan manajemen proyek
D. Pengorganisasian	1. Mendidik anggota-anggota masyarakat untuk menerima tanggung jawab terhadap organisasi mereka	1. Keterampilan-keterampilan interaksional
	2. Mengajar mereka tentang keterampilan – keterampilan dan tehnik-tehnik organisasi yang penting guna pemeliharaan organisasi	2. Keterampilan organisasional
		3. Keterampilan manajemen proyek
		4. Keterampilan pelatih

Sumber (Huraerah, 2011 :156-157)

Organisasi merupakan wadah yang sangat penting dalam proses pengorganisasian masyarakat. Organisasi tersebut mengedepankan sasaran pokok mereka guna mencapai tujuan bersama setiap organisasi yang didirikan tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai secara maksimal, oleh karena itu suatu organisasi menentukan sasaran pokok mereka berdasarkan kriteria-kriteria organisasi tertentu. Menurut Berelson dan Steiner (dalam Furqon, 2009:55) sebuah organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Formalitas, merupakan ciri organisasi sosial yang menunjuk kepada adanya perumusan tertulis daripada peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan seterusnya.
2. Hierarki, merupakan ciri organisasi yang menunjuk pada adanya suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida, artinya ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada organisasi tersebut.
3. Besarnya dan Kompleksnya, dalam hal ini pada umumnya organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antar anggota adalah tidak langsung (*impersonal*), gejala ini biasanya dikenal dengan gejala “birokrasi”.
4. Lamanya (*duration*), menunjuk pada diri bahwa eksistensi suatu organisasi lebih lama daripada keanggotaan orang-orang dalam organisasi itu.

Organisasi sebagai wadah menyatukan beberapa kebutuhan setiap masyarakat termasuk orang-orang yang mengalami disfungsi sosial. Pada umumnya organisasi mempunyai dua tipe yaitu organisasi formal dan informal, organisasi formal adalah organisasi yang memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Sasaran organisasi formal dinyatakan secara eksplisit, status, *prestise*, imbalan, pangkat dan jabatan, serta prasarat lainnya terurutkan dengan baik dan terkendali, sedangkan organisasi non formal adalah keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap

kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut, sifat eksak hubungan antar anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikas.

Tipe organisasi dari tujuan dan pendanaannya, terbagi dalam 4 kategori yakni:

1. Pure - Profit Organisation Tujuan organisasi adalah menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyakbanyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor dan kreditor.
2. Quasi - Profit Organisation Tujuan organisasi adalah menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, investor pemerintah, kreditor dan para anggota.
3. Quasi - Non Profit Organisation Tujuan organisasi adalah menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan (surplus). Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor pemerintah, investor swasta, kreditor
4. Pure - Non Profit Organisation Tujuan organisasi adalah menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laga BUMN/BUMD, penjualan aset negara dan sebagainya.

Organisasi dan sekaligus komunitas yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan diri dalam penelitian ini adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “Taman Putri” di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Lembaga ini termasuk dalam lembaga yang terbentuk dari proses pemberdayaan masyarakat melalui Program PHBM yang menanggung para masyarakat petani kopi yang menggunakan lahan hutan KPH Perhutani Jember sebagai lahan pertanian mereka yang tetap menjaga agar hutan tetap lestari. Langkah awal yang dilakukan

melalui program PHBM ini adalah melakukan intervensi terhadap komunitas atau organisasi yang ada di dalam masyarakat tersebut dengan mengenalkan pengelolaan lahan hutan yang tepat sehingga walaupun mereka menggunakan lahan hutan sebagai tempat bercocok tanam memperoleh hasil ekonomi dari itu, para petani ini juga tetap harus menjaga agar hutan tetap lestari karena hutan ini merupakan lahan hutan lindung.

Dalam kaitannya dengan luas lingkup intervensi komunitas, Mayo merujuk kepada *Gulbenkian Report 1969* (dalam Adi, 2005:82-83) melihat setidaknya komunitas mempunyai tiga tingkatan yang berbeda dimana sebuah intervensi komunitas dapat dilakukan, yaitu:

- a. *Grassroot* ataupun *neighbourhoodwork* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap kelompok masyarakat yang berada di daerah tersebut, misalnya di dalam suatu Kelurahan ataupun Rukun Tetangga)
- b. *Local agency* dan *inter-agency work* (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap organisasi payung di tingkat local, provinsi ataupun di tingkat yang lebih luas, bersama jajaran pemerintahan yang terkait serta organisasi non pemerintahan yang berminat terhadap hal tersebut)
- c. *Regional* dan *national community planning work* (misalnya pelaku perubahan melakukan intervensi pada isu yang terkait dengan pembangunan ekonomi, ataupun isu mengenai perencanaan lingkungan yang mempunyai cakupan lebih luas dari bahasan di tingkat lokal)

Rothman (dalam Adi, 2005:85) menggambarkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui intervensi komunitas dapat dilakukan melalui tiga model (pendekatan), yakni melalui pendekatan yang bersifat konsensus seperti Pengembangan Masyarakat Lokal (*Locality Development*); kepatuhan seperti pendekatan perencanaan dan kebijakan social (*Social Planning/Policy*); ataupun melalui pendekatan konflik seperti Aksi Sosial (*Social Action*). Model intervensi perencanaan sosial dan kebijakan sosial di atas merupakan model intervensi yang diarahkan pada upaya mengubah masyarakat di tingkatan yang lebih luas, misalnya di

tingkatan provinsi, regional (antar provinsi) ataupun nasional. Sedangkan model intervensi yang terkait dengan upaya melakukan perubahan di level komunitas adalah model pengembangan masyarakat. (Adi, 2005:188-189).

Upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa strategi yaitu, (a) Strategi pemecahan masalah, dimaksudkan untuk mengajak warga masyarakat melihat dan menyadari permasalahan yang dihadapi, kemudian mendiskusikan bersama bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Teknik *motivating* dan *supporting* bisa digunakan untuk membangkitkan kepercayaan diri (*self-reliance*) mereka, sebagai unsur penting yang harus dikembangkan ; (b) Konfrontasi, merupakan strategi mengonfrontasikan masyarakat dengan permasalahan yang dihadapi. Strategi ini dimaksudkan untuk dapat menimbulkan kesadaran, menggalang kesatuan, dan kekuatan mereka untuk bertindak dalam menangani masalah tersebut ; (c) Membangun kelembagaan baru, yaitu membangun lembaga-lembaga dalam masyarakat dengan menggunakan sumber daya masyarakat setempat, dimana masyarakat diintegrasikan ke dalam lembaga tersebut; (d) Pengembangan dan peningkatan keterampilan hidup (*life skills*), dengan mengajarkan cara-cara atau alat-alat dalam perubahan yang direncanakan; (e) Terapi pendidikan, yaitu strategi untuk mengikutsertakan masyarakat dalam suatu program pelatihan tertentu, saling bekerjasama secara demokratis, dan belajar untuk menilai dan menghargai kerjasama tersebut. (Huraerah, 2011:186-187)

Berkaitan dengan penelitian ini konsep strategi pengembangan dan Pengembangan serta intervensi komunitas yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” memberikan manfaat dan tercapainya tujuan yang telah direncanakan dalam lembaga tersebut sehingga kemajuan keadaan masyarakat ke arah yang lebih baik menjadi indikator keberhasilannya, yang bisa dinilai dari terwujudnya perbaikan keberlanjutan di dalam masyarakat meliputi keadaan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkembang, pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui perubahan pola pikir dan pendidikan, pengembangan modal sosial masyarakat salah satunya adalah pengembangan kemampuan kelembagaan masyarakat, dan

pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak hanya bersifat komersial tetapi lebih kepada perbaikan lingkungan untuk kehidupan manusia seperti lebih menjaga pengelolaan limbah yang mereka hasilkan. Sehingga dari hasil pemberdayaan tersebut dapat memberikan dampak yang nyata yaitu tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat, dimana konsep kesejahteraan sosial akan di jelaskan pada sub bab berikutnya.

## 2.6 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kondisi sejahtera yang menjadi tujuan bersama dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang dimaksud adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Merujuk pada batasan PBB (Suharto, 2005, hal. 34-35), kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi dan bidang kegiatan menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.

Dalam pengertian kesejahteraan sosial sebagaimana dikemukakan menggunakan pokok-pokok pikiran bahwa konsepsi kesejahteraan sosial merujuk pada (dalam Suharto, 2011, hal. 35):

“(a)Kondisi statis atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial; (b)Kondisi dinamis, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis di atas; (c)Institusi, arena atau bidang

kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan atau pelayanan sosial”.

Definisi-definisi mengenai pengertian kesejahteraan sosial tersebut, memberikan pemahaman pada hakekatnya kesejahteraan sosial memiliki suatu penekanan pada terpenuhinya suatu kebutuhan manusia, hidup layak dan mampu mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Ketika manusia mendapatkan poin-poin tersebut, maka manusia secara langsung akan merasakan suatu kesejahteraan dalam hidupnya baik material, spiritual, dan sosialnya. Sebagaimana dijelaskan tentang kesejahteraan sosial dan untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan sebuah usaha yaitu Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Adi (2005, hal. 86), yaitu suatu program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab masalah dan kebutuhan yang berada dalam masyarakat serta untuk mewujudkan suatu kondisi kesejahteraan sosial.

Usaha Kesejahteraan Sosial sendiri lahir sebagai alat untuk mencapai kondisi kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan baik itu oleh lembaga pemerintah maupun swasta. LMDH Taman Putri merupakan salah satu lembaga yang melakukan UKS ini yang bertujuan meningkatkan kualitas ekonomi maupun sumber daya manusia masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam kajian ini yang dimaksud dengan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat adalah bagaimana suatu lembaga seperti LMDH “Taman Putri” dapat menanggung para anggotanya sehingga dapat mengembangkan UKS yang terkonsep dalam suatu program yaitu PHBM sehingga menjawab dan menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat yaitu peningkatan keadaan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, maupun kelestarian lingkungan.

## 2.7 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberikan landasan serta acuan kerangka berpikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan informasi pendukung sebuah penelitian maka perlu dilakukan untuk penelaahan kepustakaan yang termasuk didalamnya adalah tinjauan terdahulu. Oleh karena itu, adanya tinjauan penelitian terdahulu diperlukan guna menjadi acuan penelitian yang akan dilakukan, sehingga diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sedang dilakukan.

Kajian penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian-penelitian yang berhubungan dengan Strategi Pengembangan Masyarakat Petani Kopi Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Meskipun memiliki perbedaan objek penelitian, dimensi ruang (lokasi), dimensi waktu, pembahasan dalam penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan rujukan berpikir secara teoritik bagi penelitian ini.

Setelah melakukan filterasi peneliti terhadap penelitian terdahulu, dari beberapa judul yang ada, peneliti mengambil tiga penelitian yang terutama terkait dengan konteks penelitian. Ketiga penelitian tersebut, yaitu;

- a) Diah Puspaningrum (2011) dengan judul “Pelebagaan Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Desa Hutan”, penelitian ini lebih berfokus ada pelembagaan Program PHBM menjadi LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), dimana temuan yang didapat penelitian ini yaitu Dampak bagi masyarakat yang mengelola lahan yang didapat dari program PHBM dan melalui LMDH yaitu terjadi peningkatan kesejahteraan serta dampak bagi masyarakat yang tidak mengelola lahan yaitu adanya peluang mendapatkan pekerjaan sebagai buruh yang bekerja di lahan petani kopi hutan. Perubahan ekonomi masyarakat desa hutan mengakibatkan perubahan struktur pada masyarakat desa hutan yang mengelola lahan di hutan karena terjadi mobilitas secara vertikal dari masyarakat kelas bawah menjadi masyarakat kelas atas.

- b) Mohamad Rizal Nur Zain, Saleh Soeaidy, Lely Indah Mindarti (2013) dengan judul “Kemitraan Antara KPH Perhutani Dan LMDH Dalam Menjaga Kelestarian Hutan (Studi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)”, penelitian ini berfokus pada kerjasama yang terjadi antara Perhutani dan LMDH sebagai perwakilan dari masyarakat yaitu antara KPH Perhutani dengan LMDH dalam menjaga kelestarian hutan beserta kesejahteraan masyarakat harus selalu ditingkatkan dengan menekankan prinsip kemitraan, yaitu dengan saling mengerti kebutuhan satu sama lain, keberhasilan dari kerjasama ini menjadi terwujud dan berjalan dengan baik melalui diskusi/hubungan bersama tanpa adanya perselisihan pendapat sehingga dapat disetujui bersama dan berjalan dengan baik. Dimana ada suatu hal yang dianggap sebagai permasalahan harus diselesaikan di saat kedua belah pihak yaitu KPH Perhutani dan LMDH bertemu dalam acara rapat diskusi bersama.
- c) Tri Cahyono, Narya Tantri Ayu Dewani, dan Dwi Ardy Sugiono (2015) dengan judul Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) Dengan Syarat: “Revolusi Mental” Berbasis *Community Based Development* (Cbd) Desa Hutan (Studi Pada Masyarakat Desa Hutan di Jawa Timur), fokus penelitian kepada bagaimana PHBM harus didukung revolusi mental yang melibatkan masyarakat lokal dan pengelola hutan sehingga dapat tercipta pembangunan masyarakat hutan yang berbasis ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Program PHBM baik di Indonesia secara umum maupun Jawa Timur secara khusus masih menimbulkan berbagai kekhawatiran mengenai upaya pembangunan berkelanjutan. Dari sudut pandang masyarakat desa hutan melalui LMDH, pada kondisi eksisting masih belum cukup berdaya utamanya dari segi ekonomi, sosial, dan Pengembangan lingkungan. Kondisi ini yang kemudian coba diperbaiki dengan Revolusi Mental berbasis *Community Based Development* (CBD) desa hutan. Pertumbuhan LMDH dan lahan tumpangsari yang berkorelasi positif terhadap penurunan pencurian dan kerusakan SDH dicoba untuk diperbaiki sistem kelembagaannya. Revolusi

Mental menggambarkan paradigma baru yang disesuaikan dengan kondisi struktural dan kultural.

Ketiga penelitian tersebut di atas menjadi rujukan peneliti dalam tulisan ini karena semuanya berkaitan dengan fenomena yang diangkat oleh penulis, dimana dari ketiganya dapat dipahami tentang proses pemberdayaan dan pengembangan organisasi maupun masyarakat yang menempati kawasan sekitar hutan dan dalam prosesnya melalui suatu program pemberdayaan yaitu Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sehingga dapat menjadi referensi peneliti untuk mendapatkan komparasi hasil penelitian yang ditulis yaitu mendeskripsikan strategi LMDH “Taman Putri” dalam proses pemberdayaan masyarakat petani kopi Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang juga merupakan bagian dari Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Program Hutan Kemasyarakatan (*Social Forestry*).

## 2.8 Kerangka Pikir Konsep Penelitian

Road map/alur pikir penelitian menjelaskan arah penelitian sehingga nantinya dapat tergambar tujuan sesuai dengan fokus penelitian. Road map/alur pikir penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan strategi LMDH “Taman Putri” dalam proses pemberdayaan masyarakat petani kopi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Pemberdayaan memiliki konsep tersendiri yaitu sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan

mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005:57-60). Sedangkan pengembangan masyarakat memiliki konsep yaitu sebagai upaya pengembangan kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai, yang di dalamnya menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik, dan pemberlajaran terus menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka (Zubaedi, 2013: 4).

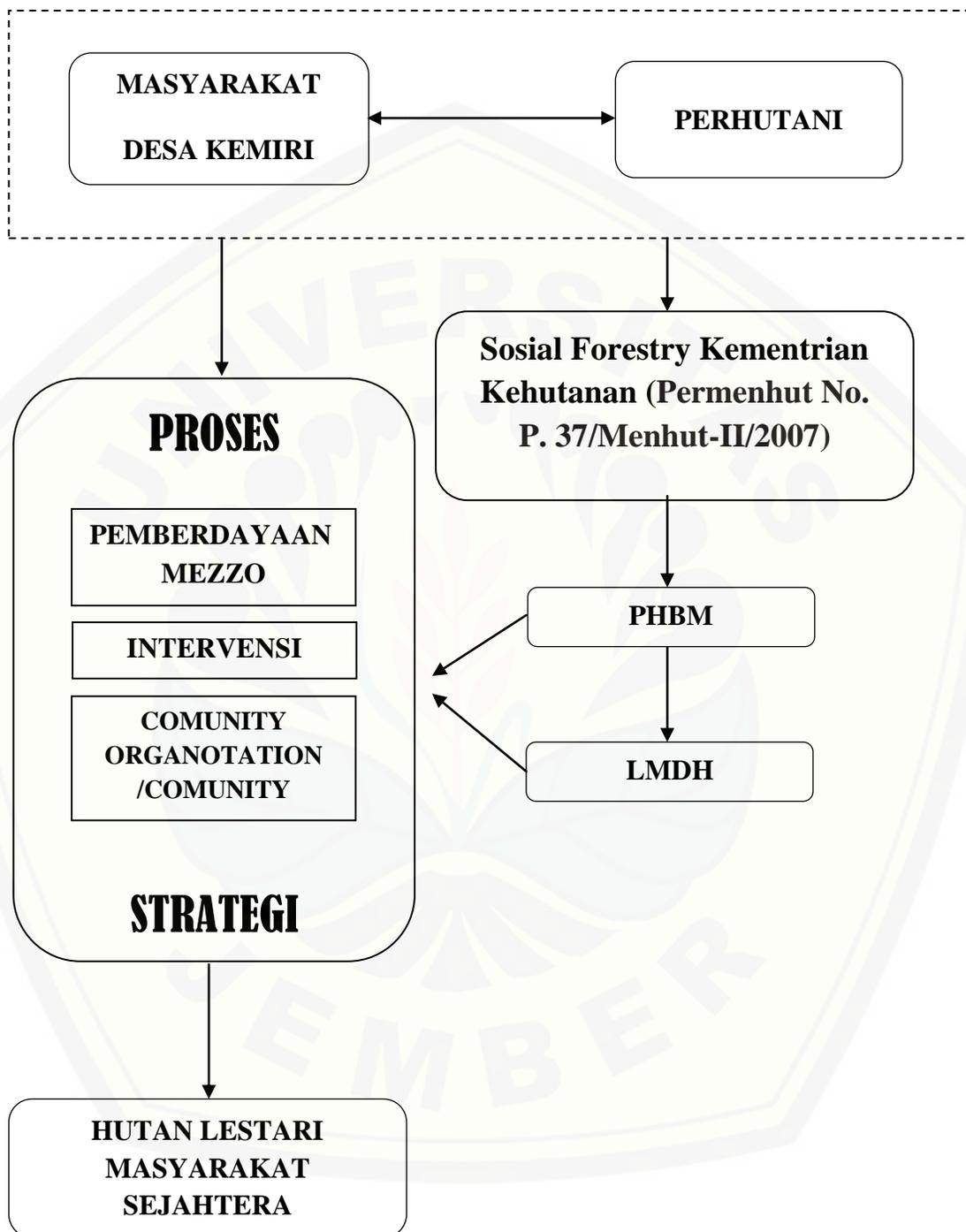
Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, berkecenderungan masih pra sejahtera yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses informasi, teknologi, modal dan pasar bahkan sarana prasarana seperti jalan dan penerangan masih kurang. Masyarakatnya masih terbelakang baik pengetahuan, maupun pendidikannya. Budayanya masih sangat tradisional akan tetapi mempunyai komunitas social yang kental dalam kegotong-royongannya antar masyarakat. Keadaan tersebut yang seakan-akan masyarakatnya terisolasi di kawasan sekitar hutan memaksa mereka dalam memenuhi kebutuhan tidak lain adalah dengan menggunakan sumberdaya alam yang tersedia di hutan, dan sering kali pengelolaan sumberdaya ala yang ada tersebut tidak sesuai prosedur pengelolaan kehutanan yang dapat memberikan akibat buruk terhadap lingkungan hutan seperti terjadinya bencana alam tanah longsor dan sebagainya. Oleh karena hal tersebut diperlukan program pengembangan masyarakat yang dapat memberikan pemahaman tentang pengelolaan sumberdaya alam hutan kepada masyarakat sekitar hutan sehingga pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan mereka dan tetap sinergi dengan pelertarian hutan tempat mereka menetap.

Peneliti melihat bahwa pelaksanaan Program Sosial Forestry PHBM yang telah terlaksana di Desa Kemiri adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat yang berhasil mencapai tujuan program dan keberhasilan tersebut tidak lain merupakan

hasil dari terbentuknya kerjasama yang baik antara Perhutani dan para petani kopi yang tergabung dalam LMDH “Taman Putri”. Hal tersebut terlihat dari keadaan ekonomi dan kesejahteraan petani kopi di Desa Kemiri ini sudah dikatakan sejahtera dan berdaya, bahkan para petani kopi Desa Kemiri tidak hanya mendapatkan penghasilan dari bertani saja tetapi juga memiliki ternak yang menjadi pendapatan tambahan mereka. Pemberdayaan yang dilakukan tersebut tergolong dalam pemberdayaan tingkat mezzo yang menggunakan kelompok sebagai alat intervensi, selain itu juga terdapat pengorganisasian dan pengembangan masyarakat dalam proses pemberdayaannya.

Perubahan yang terjadi pada petani kopi Desa Kemiri tidak hanya pada segi ekonomi saja untuk mencapai kesejahteraan, tetapi juga kepada pemikiran mereka bahwa jika mereka mengelola lahan yang sebenarnya adalah lahan hutan yang menjadi hutan lindung milik pemerintah mereka lebih memikirkan pengelolaan hutan yang bersifat tetap melestarikan hutan yang menjadi tempat mereka bercocok tanam, hal tersebut tidak lain merupakan karena keberhasilan strategi pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan LMDH “Taman Putri”. Oleh karena hal tersebut diatas penelitian ini lebih berfokus pada bagaimanakah dan apa saja strategi yang dilakukan LMDH “Taman Putri” Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam melaksanakan setiap program-program yang telah terencana dalam Program PHBM sehingga dapat mencapai keberhasilan yaitu peningkatan kesejahteraan para petani kopi dan tetap menjaga kelestarian hutan sebagai tempat program tersebut terlaksana.

Dari penjabaran di atas dapat dilihat secara detail alur fikir konsep penelitian ini dapat dilihat melalui *Gambar 2.1 Alur Fikir Konsep Penelitian*.



Gambar 2.1 Alur Fikir Konsep Penelitian (Sumber: Diolah penulis, 2017)

## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Pada umumnya penelitian merupakan suatu generalisasi dan menjelaskan fenomena. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, dibutuhkan metode penelitian yakni suatu prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam memecahkan suatu masalah, sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian, diharapkan peneliti dapat lebih mudah dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab suatu permasalahan. Sebagaimana pendapat Sugiyono (2014 : 2): "Metode penelitian yakni merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu". Dengan demikian, metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam pengumpulan dan penganalisisan data penelitian, untuk dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menentukan keberhasilan proses penelitian.

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Hamidi (2010:3), pendekatan kualitatif merupakan suatu aktivitas pengamatan (observasi) terhadap aktivitas individu atau kelompok yang diteliti situasi sosialnya dalam melakukan aktivitasnya untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informasi, atau cerita yang rinci tentang subyek dan latar sosial penelitian.

Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu mendapatkan data secara rinci, sehingga peneliti dapat pemahaman yang mendalam pada subyek penelitian. Penelitian ini terkait bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LMDH "Taman Putri" sehingga dapat mencapai tujuan Progam PHBM yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lahan hutan secara bersama dengan masyarakat dan tetap menjaga kelesatarian hutan yan dikelola oleh pihak Perhutani. Penggunaan pendekatan penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk menemukan informasi-informasi yang kemudian dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran khusus

dan mengkaji secara ilmiah gambaran strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” dalam pelaksanaan Program PHBM tersebut.

### 3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif sesuai dengan fokus penelitian karena berusaha menggambarkan fenomena sosial secara terperinci dari strategi yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bungin (2007:68) bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, berupaya menarik realitas itu di permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

Nawawi (2001, hal. 63) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah suatu prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan suatu obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak/ sebagaimana adanya. Konteks penelitian ini menekankan pada jenis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan gambaran strategi Pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh LMDH Taman Putri Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

### 3.1.2 Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Alasan Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Desa Kemiri Merupakan salah satu tempat pelaksanaan Program PHBM yang salah satu hasilnya adalah berdirinya suatu lembaga yang menaungi para petani kopi dalam pelaksanaan program ini yaitu LMDH “Taman Putri”. Lembaga ini

menjadi tonggak utama keberhasilan program tersebut. Sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu anggota LMDH “Taman Putri” pada saat peneliti melakukan observasi tanggal 20 februari 2016, beliau mengatakan bahwa dengan terbentuknya lembaga ini sangat berpengaruh pada kehidupan petani kopi karena dengan adanya lembaga ini para petani lebih terkoordinir dalam pengelolaan lahan. Langkah-langkah yang dilakukan lembaga ini antara lain melakukan pelatihan tanam yang tidak merusak lingkungan hutan serta mencarikan bantuan bibit untuk petani sehingga untuk proses tanam mereka dapat menekan anggaran dan hasil panen nantinya menjadi maksimal.

Data tersebut memperlihatkan bahwa LMDH ‘Taman Putri’ adalah lembaga yang sangat berperan dalam keberhasilan Program PHBM yang dilakukan oleh Perhutani Jember di Desa Kemiri ini. Keberhasilan LMDH “Taman Putri” Desa Kemiri dalam upayanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Oleh karena hal tersebut peneliti memilih Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian.

### **3.2 Teknik Penentuan Informan**

Informan dalam penelitian mempunyai peranan yang sangat penting. Menurut Moleong (2014:132) menyatakan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang obyek penelitian bagi peneliti. Informan adalah orang yang mengetahui tentang suatu kejadian atau peristiwa di lapangan dan terlibat langsung dalam kejadian itu sehingga apabila peneliti bertanya tentang suatu keadaan, peristiwa atau kejadian maka penulis mendapatkan data yang valid. Informan disini nantinya sebagai obyek yang aktif memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan peneliti. Sehingga dalam hal ini peneliti berusaha menggali informasi lebih dalam dari informan.

Informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian yang disampaikan informan berperan penting untuk memudahkan peneliti dalam memahami fenomena. Penentuan informan yang tepat dalam penelitian dapat

dilakukan dengan mencari keterangan dari orang yang berwenang dan terlibat langsung dalam pembentukan LMDH ‘Taman Putri’ serta yang paling banyak mengetahui proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut dalam benjalannya Program PHBM. Pada tahap penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*, dimana dengan teknik ini dirasa oleh peneliti dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan dalam memahami fenomena yang terjadi di lapangan serta dengan tepat memilih informan yang memiliki informasi lengkap. Sesuai dengan definisi penelitian empirik yaitu mendefinisikan sampling sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (Bungin, 2012:51).

*Purposive* menurut Sugiyono (2004:96) “penentuan informan dengan pertimbangan tertentu”. Jadi penelitian ini menggunakan metode *purposive* dengan mempertimbangkan kriteria informan itu sendiri. Penentuan informan didasarkan pada pengetahuan tentang data atau informasi yang diperlukan peneliti mencari orang-orang yang benar-benar tahu tentang data atau informasi yang diperlukan. Teknik *Purposive* dilakukan untuk menentukan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau yang akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012:54). Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu informan pokok dan informan tambahan. Jadi penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Selanjutnya, berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampelnya tersebut, peneliti akan menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Sehingga dalam penentuan informan penulis menggunakan teknik tersebut karena data bersifat menyebar. Perlu ditegaskan pula, metode penentuan informan menggunakan teknik *Purposive* dimaksudkan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dan menggali informasi dari berbagai sumber.

### 3.2.1 Informan Pokok (*Primary Informan*)

Informan pokok berfungsi sebagai sumber data utama, Suyanto dan Sutinah (2005:172) informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang yang paling banyak mengetahui dan terlibat langsung dalam perilaku dalam kegiatan yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri”.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dalam penelitian ini penentuan pengkategorisasian informan pokok akan dijelaskan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kategorisasi Informan Pokok

No	Informasi Umum	Tentang	Sumber	Kriteria	Metode Penentuan Informan
1	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember	Histori	Perhutani	- Berperan dalam pelaksanaan program PHBM	Proposive
			LMDH	- Mengetahui sejarah awal pelaksanaan program	Proposive
2	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember	Pelaku	Perhutani	- Berperan dalam pelaksanaan program PHBM	Proposive
			LMDH	- Termasuk pengurus dari stakeholder maupun LMDH dalam pelaksanaan program	Proposive
3	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten	Proses	Perhutani	- Berperan dalam pelaksanaan program PHBM	Proposive
			LMDH	- Termasuk pengurus dari stakeholder maupun	Proposive

No	Informasi Umum	Tentang	Sumber	Kriteria	Metode Penentuan Informan
	Jember			LMDH dalam pelaksanaan program	

Sumber: Diolah dari data primer, 2017

Berdasarkan karakteristik penentuan informan pokok di atas, maka informan yang masuk dalam karakteristik tersebut adalah orang informan pokok yang sebagai pengurus LMDH “Taman Putri” serta pihak KPH Perhutani Jember yaitu informan JR , informan HB, informan IS , informan SL , informan AS dan informan LK seperti yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Identitas Informan Pokok dan Jabatannya

No.	Nama	Jabatan
1.	Informan JR	Ketua Umum LMDH “Taman Putri”
2.	Informan HB	Sekretaris LMDH “Taman Putri”
3.	Informan IS	Anggota LMDH “Taman Putri”
4.	Informan SL	Anggota LMDH “Taman Putri”
5.	Informan AS	Kaur PHBM Dan Pengembangan Koprasi KPH Perhutani Jember
6.	Informan LK	Staff PHBM KPH Perhutani Jember

Sumber: Diolah dari data primer, 2017

Berikut adalah profil informan pokok tersebut di atas secara umum :

- 1) Informan JR adalah Ketua Umum LMDH “Taman Putri” masa jabatan tahun 2014-2019 berdasarkan pembaharuan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat

- Lembaga Masyarakat Desa Hutan “Taman Putri” Desa Kemiri Tahun 2015. Informan berusia 45 tahun, pendidikan terakhir SMA.
- 2) Informan HB adalah Sekretaris LMDH “Taman Putri” masa jabatan tahun 2014-2019 berdasarkan pembaharuan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Lembaga Masyarakat Desa Hutan “Taman Putri” Desa Kemiri Tahun 2015. Informan berusia 25 tahun, pendidikan terakhir SMA.
  - 3) Informan IS adalah Bendahara LMDH “Taman Putri” masa jabatan tahun 2014-2019 berdasarkan pembaharuan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Lembaga Masyarakat Desa Hutan “Taman Putri” Desa Kemiri Tahun 2015. Informan berusia 57 tahun, pendidikan terakhir SMA.
  - 4) Informan SL adalah anggota LMDH “Taman Putri” yang telah menjadi anggota sejak awal pendirian lembaga dan salah satu anggota yang berperan dalam aktif dalam pengembangan lembaga serta pengelolaan lahan hutan. Informan berusia 58 tahun, pendidikan terakhir SMA.
  - 5) Informan AS adalah Kaur PHBM dan Pengembangan Koperasi KPH Perhutani Jember yang sangat mengetahui sejarah pelaksanaan Program PHBM serta visi misinya.
  - 6) Informan LK adalah Staff PHBM KPH Perhutani Jember yang telah mendampingi para petani sejak awal pendirian LMDH sehingga kegiatannya tetap terkawal dan sesuai visi dan misi program PHBM.

### 3.2.2 Informan Tambahan (*Secondary Informan*)

Suyanto dan Sutinah (2005:172) mengemukakan informasi tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti, serta membantu untuk pengecekan kembali keabsahan data yang didapatkan dari informan pokok sebelumnya. Informasi tambahan merupakan orang yang dianggap mengetahui tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh LMDH “Taman Putri” serta yang merasakan pula dampak dari pelaksanaan program

Pengembangan walaupun mereka tidak terlibat langsung. Peneliti telah menetapkan karakteristik dan kategori informan tambahan dalam tabel .. berikut :

Table 3.3 Kategorisasi informan tambahan

No	Informasi Umum	Tentang	Sumber	Kriteria	Metode Penentuan Informan
1	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember	Histori	Stakeholder lain	- Berperan dalam pelaksanaan program PHBM	Proposive
			Masyarakat	- Mengetahui sejarah awal pelaksanaan program - Merasakan dampak keberhasilan program pemberdayaan	Proposive
2	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember	Pelaku	Stakeholder lain	- Berperan dalam pelaksanaan program PHBM	Proposive
			Masyarakat	- Mengetahui sejarah awal pelaksanaan program - Merasakan dampak keberhasilan program pemberdayaan	Proposive
3	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember	Proses	Stakeholder lain	- Berperan dalam pelaksanaan program PHBM	Proposive
			Masyarakat	- Mengetahui sejarah awal pelaksanaan program - Merasakan dampak keberhasilan program pemberdayaan	Proposive

No	Informasi Umum	Tentang	Sumber	Kriteria	Metode Penentuan Informan
----	----------------	---------	--------	----------	---------------------------

Berdasarkan karakteristik penentuan informan tambahan di atas, maka informan yang masuk dalam karakteristik tersebut adalah seperti yang disajikan dalam bentuk table di bawah ini:

Table 3.4 Identitas informan tambahan

No	Nama	Status
1.	Informan TH	Koordinator LMDH se- wilayah LYT (Lereng yang timur) Lahan Hutan Lindung Kecamatan Panti
2.	Informan SY	Kepala Desa Kemiri
3.	Informan N	Anggota LMDH Dinoyo Asri
4.	Informan AF	Salah satu masyarakat Desa Kemiri non petani hutan

Sumber: Diolah dari data primer, 2017.

Berikut adalah profil informan tambahan tersebut di atas secara umum :

- 1) Informan TH adalah koordinator seluruh LMDH yang berada di Lereng Yang Timur (LYT) wilayah hutan lindung kecamatan panti yang dikelola oleh KPH Perhutani Jember.
- 2) Informan N merupakan anggota dari LMDH “Dinoyo Asri” yang letaknya bersebelahan dengan LMDH “Taman Putri”.
- 3) Informan SY adalah Kepala Desa Kemiri yang menjabat 2 periode terakhir sehingga sangat mengetahui tentang perkembangan keadaan desa serta masyarakat Desa Kemiri.

- 4) Informan AL adalah salah satu masyarakat Desa Kemiri yang mengetahui dan memperhatikan keadaan dari para petani kopi anggota LMDH “Taman Putri” karena merupakan salah satu saudara dari anggota.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 3.3.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengambilan data dengan cara mengamati hal-hal yang berjalan selama proses penelitian. Untuk mengetahui bagaimana proses strategi Pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” peneliti melakukan observasi dalam penelitian. Menurut Marshall dalam Sugiyono (2014, hal. 64) menyatakan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dengan pengumpulan data melalui catatan-catatan lapangan dan melakukan pengamatan untuk mengetahui situasi dan kondisi objek yang diteliti. Dalam aktifitas tersebut peneliti dengan sengaja mengamati bagaimana anggota LMDH “Taman Putri” bekerjasama dengan stakeholder yang terkait melakukan strategi Pengembangan masyarakat. Kemudian peneliti mengidentifikasi respon yang diterima dari perilaku informan.

Data observasi yang di dapat peneliti selama proses penelitian antara lain adalah data geografis desa Kemiri yang menjadi lokasi berdirinya LMDH “Taman Putri”, data tentang kegiatan keseharian para petani kopi yang tergabung dalam LMDH “Taman Putri”, keadaan ekonomi mereka yang dapat dilihat dari bagaimana keadaan tempat tinggal para petani, bagaimana proses pengelolaan hasil kopi serta

pengelolaan pendukung proses tani kopi. Keseluruhan data yang didapat dari observasi ini menjadi pendukung dalam proses analisa penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

### 3.3.2 Wawancara

Moleong (2014:186), mengemukakan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Sedangkan menurut Esterbeg (2002) dalam Sugiyono (2014, hal. 72), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu ide tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah pelaksanaan wawancara ini lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara ini mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Waktu pelaksanaan wawancara disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh informan, karena semua informan adalah pekerja tani yang kegiatan keseharian mereka rata-rata dilaksanakan dari pagi hingga sore hari maka peneliti melaksanakan proses wawancara di waktu senggang kerja mereka yaitu pada sore hari dan malam hari. Waktu tersebut di pilih untuk mendapatkan kedalaman data sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga kelengkapan data dapat mendukung dalam proses analisa.

Proses wawancara semi-terstruktur dengan memberikan pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan karena memiliki pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur urutan dan penggunaan kata sehingga walaupun terlihat fleksibel namun tetap terkontrol. Dalam pelaksanaan wawancara dibutuhkan jalinan yang akrab antara peneliti dan informan agar dapat memperoleh informasi yang akurat dan mendalam seputar fenomena yang akan dikaji. Sehingga dapat dengan mudah melakukan cek dan ricek informasi hasil wawancara untuk

mengetahui konsistensi informan dalam memberikan kebenaran informasi yang diperoleh.

### 3.3.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini dijadikan sebagai sumber penguat data yang telah didapatkan, artinya teknik dokumentasi ini adalah sebuah kegiatan mengumpulkan data melalui tulisan, arsip, artikel, literatur, jurnal, buku atau akses dari internet serta dokumen yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Menurut Koentjaraningrat (dalam Adi, 2005:61), “Surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya”. Faisal (1990:81) menyatakan bahwa :

“Sumber-sumber informasi nonmanusia, seperti dokumen (*documents*) dan rekaman/catatan (*records*), dalam penelitian kualitatif seringkali diabaikan sebab dianggap tidak dapat disejajarkan keakuratan dan kerinciannya dengan hasil wawancara dan observasi yang ditangani langsung oleh peneliti sebagai tangan pertama. Sumber data nonmanusia merupakan suatu yang sudah tersedia, dan peneliti tinggal memanfaatkannya. Sumber informasi yang berupa dokumen dan rekaman/catatan sesungguhnya cukup bermanfaat; ia telah tersedia sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya. Ia dapat dianalisis berulang-ulang dengan tidak mengalami perubahan. Untuk informasi konteks, ia dapat merupakan sumber yang cukup kaya. Ia merupakan data yang secara legal dapat diterima dan tak dapat memberikan reaksi apapun terhadap peneliti sebagaimana halnya sumber data yang berupa manusia”

Berdasarkan konsep tersebut, maka peneliti memerlukan dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yang akan berguna dalam memberikan wawasan dan pemahaman dasar kerangka berfikir atau definisi konseptual yang dapat diperoleh melalui buku, internet, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian, serta foto-foto yang menggambarkan atau membantu peneliti dalam memahami fenomena pada saat observasi dan

wawancara. Sehingga dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai metode untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh peneliti.

Data dokumentasi yang didapat dalam penelitian ini antara lain adalah dokumentasi tentang adalah data dokumentasi desa Kemiri yang menjadi lokasi berdirinya LMDH “Taman Putri”, data dokumentasi kegiatan keseharian para petani kopi yang tergabung dalam LMDH “Taman Putri”, keadaan ekonomi mereka yang dapat dilihat dari bagaimana dokumentasi keadaan tempat tinggal para petani, bagaimana proses pengelolaan hasil kopi serta pengelolaan pendukung proses tani kopi. Keseluruhan data yang didapat dari dokumentasi ini menjadi pendukung dalam proses analisa penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan secara kualitatif, yaitu pemaknaan atau penafsiran data yang di peroleh oleh peneliti selama penelitian berlangsung, baik catatan lapangan, hasil wawancara dan dokumentasi. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan (dalam Sugiyono, 2014, hal. 224) menyatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Sebelum mendapatkan kesimpulan akhir penulis melakukan *cross check* terlebih dahulu dari data-data yang telah diperoleh penulis. Terakhir adalah penyimpulan akhir. Menurut Irawan (2006, hal. 76-80), ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif, yaitu:

#### **a. Pengumpulan Data Mentah**

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka dengan menggunakan alat bantu seperti *handphone recorder*, kamera, dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data mentah berupa rekaman suara, foto kegiatan informan,

raport informan, catatan lapangan yang menggambarkan perilaku informan dan cara komunikasi informan.

b. Transkrip Data

Pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh sebelumnya baik yang berasal dari observasi lapangan, wawancara maupun pustaka dirubah dalam bentuk tertulis (baik yang berasal dari *voice record* atau catatan tulis tangan), ke bentuk tertulis persis seperti apa adanya, tidak mencampur adukkan dengan pikiran peneliti dan pendapat orang lain. Hasil wawancara secara keseluruhan diketik dalam bentuk transkrip wawancara (terlampir), dan dokumen-dokumen seperti foto-foto (terlampir), dan lain-lain.

c. Pembuatan Koding

Peneliti membaca ulang data yang sudah ditranskrip dan menemukan hal-hal penting yang kemudian diambil kata kuncinya dan kata kunci ini yang nantinya akan diberi kode. Proses ini dalam penelitian ini dilakukan bersamaan pada saat langkah pengkategorisasian data dan menggunakan kata-kata kunci sehingga sekaligus melakukan pengkategorisasian data dan mempermudah dalam proses analisis data selanjutnya.

d. Kategorisasi Data

Pada tahap ini, peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengkategorisasikan data. Data hasil koding yang telah dilakukan bersamaan pada proses ini disederhanakan kembali dengan cara mengikat kata-kata kunci pada daftar koding dalam suatu satu besaran yang dinamakan kategori. Sehingga nantinya akan mempermudah dalam proses analisa data.

e. Penyimpulan Sementara

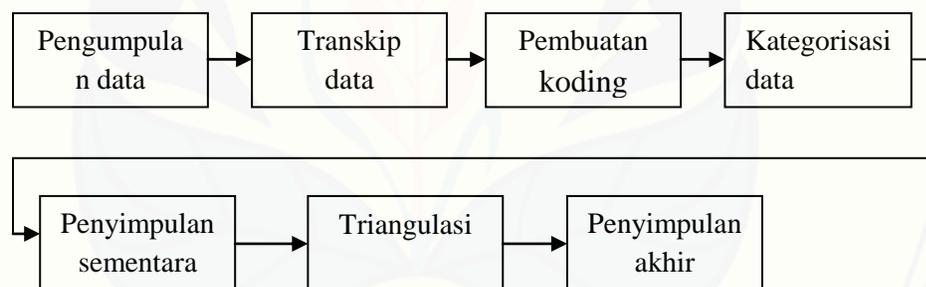
Tahap ini adalah pengambilan kesimpulan yang bersifat sementaradan semua berdasarkan data yang telah diperoleh dari para informan. Hasil kesimpulan sementara tidak ada bercampur dengan pemikiran dan penafsiran lain dari diluar data penelitian yang telah diperoleh.

f. Triangulasi

Triangulasi adalah proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Misalnya hasil wawancara dengan hasil observasi, lalu dengan hasil dokumentasi. Pengecekan data penemuan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan hasil yang telah diperoleh dari berbagai informan, data dokumen, dan foto.

g. Penyimpulan Akhir

Kesimpulan terakhir diambil dengan merangkum dari proses keseluruhan analisis data. Tahap ini dilakukan karena dianggap ketika peneliti sudah merasa bahwa data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*) data. Kemudian membuat kesimpulan akhir dengan mengamati hasil data-data yang diperoleh dari informan.



Gambar 3.1 Alur Analisis Data (Sumber: Irawan, 2006, hal. 76-78)

### 3.5 Keabsahan Data

Metode keabsahan data diperlukan dalam penelitian sosial yang secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif. Karena dalam penelitian yang bersifat empiris, informasi yang diberikan maupun perilaku masing-masing informan mempunyai makna sehingga tidak dapat langsung diterima begitu saja, oleh karena itu harus dilakukan pengujian keabsahan data. Pengukuran keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Sugiyono (2014, hal. 125) mengungkapkan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai

cara dan berbagai waktu. Sedangkan menurut Moleong (2014, hal. 330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi, yaitu *sumber*, *metode* dan *teori*.

Berdasarkan teknik keabsahan data diatas, maka teknik triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai melalui: (1) membandingkan data hasil temuan dengan hasil data wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dilakukannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen berkaitan. (Patton, 1987, hal. 331).

Penggunaan teknik triangulasi sumber dijadikan landasan peneliti dalam penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mengecek keabsahan data dilapangan yaitu hasil wawancara antara informan pokok dengan informan tambahan, mengkroscek metode hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian peneliti menganalisa hasil lapangan dengan kajian pustaka yang terpaparkan di penelitian dan dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat petani kopi yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri” Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Jember ini dilakukan melalui dua strategi yaitu :

#### 1. Strategi Pengorganisasian Masyarakat

Strategi pengorganisasian masyarakat melalui pemanfaatan kelompok merupakan langkah yang tepat dalam pelaksanaan pemberdayaan tingkat mezzo, dimana kelompok ini menjadi perantara intervensi yang dilakukan. Pengorganisasian masyarakat dilakukan karena dengan menggunakan organisasi atau kelompok dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah LMDH “Taman Putri”, sehingga dapat mempermudah program pemberdayaan yang dalam hal ini adalah PHBM dan pelaksanaannya yaitu KPH Perhutani Jember untuk melakukan intervensi kepada masyarakat yang terdapat di sekitar hutan.

#### 2. Strategi Pelatihan Pengolahan dan Pengembangan Hasil Tani Hutan

Terbentuknya LMDH “Taman Putri” yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak Perhutani dan para petani kopi memberikan peluang besar kepada para petani kopi untuk terus mengembangkan kemampuan mereka. Para petani kopi dapat mengembangkan kerjasama mereka dengan dinas-dinas terkait pengolahan hasil tanam kopi mereka sehingga dapat terus meningkatkan kemampuan pengolahan hasil pertanian yang di dapat dari pelatihan-pelatihan melalui kerjasama tersebut. Selain itu mereka juga dapat mengembangkan lembaga yang telah terbentuk dan berbadan hukum untuk memberikan kesadaran kepada para anggotanya bahwa berorganisasi dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam birokrasi dan perijinan usaha

sehingga lembaga yang telah terbentuk dapat terus dikembangkan menjadi lembaga koperasi atau jenis lembaga lain yang dapat memberikan kebermanfaatan untuk para anggota dan untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

Kedua Strategi tersebut di atas dalam pelaksanaannya dilakukan melalui lima tahapan kegiatan , yaitu :

a. Pemahaman Situasi Masyarakat

Tahapan ini merupakan langkah awal dari pihak pelaksana program pemberdayaan untuk dapat memahami situasi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta masalah-masalah dan sejarah-sejarah yang terjadi di Desa Kemiri, karena setiap desa itu memiliki potensi dan masalah yang berbeda sedangkan LMDH ini sama sekali tidak menentukan komoditi apa yang akan dijadikan materi pengembangan keberdayaan masyarakat. Sehingga terjadi kesesuaian antara program pemberdayaan yang dilaksanakan dengan potensi dan kondisi masyarakat sebagai obyek pemberdayaan.

b. Pembentukan Kelompok LMDH dan Sosialisasi Program PHBM

Tahapan selanjutnya dari strategi pengorganisasian masyarakat ini adalah dengan pembentukan kelompok LMDH “Taman Putri”, diman kelompok ini beranggotakan para petani kopi yang berminat untuk mengelola lahan di dalam hutan lindung. Terbentuknya kelompok ini menjadi alat bagi pelaksana program pemberdayaan untuk melakukan sosialisasi dan intervensi lain sehingga para petani ini paham dengan Program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) serta tujuan pelaksanaan program tersebut.

c. Penentuan Komoditi Sesuai dengan Kebutuhan Kelompok LMDH dan Lingkungan

Keadaan masyarakat antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain pastinya memiliki perbedaan keadaan social masyarakatnya, sehingga diperlukan pemahaman dari masyarakat untuk mempermudah mengidentifikasi keadaan social dan ekonomi kebutuhan mereka. Tahap ini menjadi langkah dalam proses identifikasi tersebut

dengan tetap menggunakan kelompok LMDH “Taman Putri” sebagai alat intervensi untuk bersama antara pihak pelaksana program PHBM yaitu KPH Perhutani Jember.

d. Peningkatan Kemampuan Kelompok LMDH “Taman Putri” dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Tahapan ini memberikan terapi pendidikan untuk terus meningkatkan pola pikir mereka untuk mengelola lahan perhutani dengan bijak dan tetap menjaga kelestarian hutan lindung. Selain itu melalui proses ini dapat meningkatkan kualitas pengolahan hasil tani mereka menjadi memiliki daya jual yang lebih tinggi untuk dapat menjadi sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan mencapai keberhasilan program pemberdayaan yang dilakukan.

e. Pengembangan Kelembagaan

Sebagai langkah pengembangan program pemberdayaan diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang ada tentang kelembagaan dan birokrasi, hal ini dilakukan agar dapat menjadi bekal masyarakat untuk mengembangkan diri melalui kelompok atau lembaga yang telah terbentuk dari program pemberdayaan.

## 5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang perlu dijadikan pertimbangan oleh berbagai pihak yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan mengenai strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh LMDH “Taman Putri”.

1. Pelaksanaan strategi pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan terhadap para anggota kelompok LMDH perlu dilakukan perluasan kerjasama dengan dinas-dinas yang terkait lainnya dalam peningkatan kemampuan kepemimpinan sehingga kepengurusan tidak hanya bertumpu pada beberapa orang saja.
2. Kepengurusan perlu adanya pergantian secara rutin sehingga pengalaman berorganisasi dapat merata kepada seluruh anggota LMDH.

3. Koordinasi antara pihak LMDH dan Perhutani perlu diperkuat untuk lebih bisa mengembangkan kegiatan dan pengembangan program pemberdayaan yang telah dilaksanakan sehingga strategi pengorganisasian masyarakat dapat dikembangkan sesuai keadaan anggota LMDH.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adi, Isbandi R. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: FISIP UI PRESS.
- Awang, San ,A dkk. 2008. *Panduan Pengembangan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Harapan Prima, Jakarta, Indonesia
- Bungin, B. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bungin, B. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fahrudin, A. 2011. *Pengembangan Partisipasi Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung :Humaniora
- Faisal, S. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Erlangga
- Furqon, C. (2009). *Konflik Dan Stres Dalam Organisasi Universitas Pendidikan Indonesia*
- Huraerah, A. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan)*. Bandung: Humaniora.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Mansyur. M., Cholil. 1977. *Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota*. Jakarta: Usaha Nasional.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Mardikanto, T. & Soebiato, P. 2012. *Pengembangan Masyarakat. Dalam Prespektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) .2007. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kolaborasi antara Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani*

*dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Jawa.* Fakultas Kehutanan. Universitas Gadjah Mada.

Purba, J. 2005. *Pengelolaan Lingkungan Sosial.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Purwanto. (2012). *Marketing Strategi: Meningkatkan Pangsa Pasar & Daya Saing.* Platinum.

Patton, Michael Q. 1987. *Qualitative Evaluation Methods.* Beverly Hills: Sage Publications.

Prambudiarto. 2008. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)* (Master's thesis). Institute Pertanian Bogor, Indonesia.

Rahmina. 2011. *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim.* Jakarta. Forclime Bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, Indonesia.

Soerjono, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: PT. Rajawali

Suharto, E. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik.* Cetakan III. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* Bandung : Rcfika Aditama

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Suyanto, B. S. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wibowo, R. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember : UPT Penerbitan Universitas Jember

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik).* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/251/Kpts/013/2006 Tentang Forum Komunikasi Pengelolaan Pengembangan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Provinsi Jawa Timur

Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani (Selaku Pengurus Perusahaan) Nomor : 136/Kpts/Dir/2001 Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Lampiran 1

RESEARCH GAP/ KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Sasaran Telaah	Penelitian Yang Ditelaah		
	1	2	3
<b>Judul Penelitian</b>	Pelebagaan Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Hutan	Kemitraan Antara KPH Perhutani Dan LMDH Dalam Menjaga Kelestarian Hutan (Studi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) Dengan Syarat: “Revolusi Mental” Berbasis <i>Community Based Development</i> (Cbd) Desa Hutan (Studi Pada Masyarakat Desa Hutan Di Jawa imur)
<b>Tahun Penelitian</b>	2011	Tidak diketahui	2015
<b>Peneliti</b>	Diah Puspaningrum	Mohamad Rizal Nur Zain, Saleh Soeaidy, Lely Indah Mindarti	Tri Cahyono, Narya Tantri Ayu Dewani, dan Dwi Ardy Sugiono
<b>Keluaran Lembaga</b>	Agribisnis ,Fakultas Pertanian (UNEJ)	Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang	Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang
<b>Pertanyaan Penelitian</b>	Bagaimana dampak pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada	Bagaimana Kemitraan antara KPH Perhutani dengan LMDH di Kawasan hutan lindung dan produksi	1. Bagaimana perkembangan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang ada di Jawa

	Masyarakat Desa Hutan?	pada Desa Jengglungharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.	Timur?  2. Bagaimana bentuk implementasi “Revolusi Mental” dan <i>Community Based Development</i> (CBD) desa hutan di Jawa Timur?
<b>Temuan</b>	Perubahan sosial terjadi pada sektor ekonomi masyarakat desa hutan yang mengelola lahan di hutan dan masyarakat desa yang tidak mengelola lahan di hutan. Dampak bagi masyarakat yang mengelola lahan di yaitu terjadi peningkatan kesejahteraan serta dampak bagi masyarakat yang tidak mengelola lahan yaitu adanya peluang mendapatkan pekerjaan sebagai buruh yang bekerja di	Kerjasama antara KPH Perhutani dengan LMDH dalam menjaga kelestarian hutan beserta kesejahteraan masyarakat harus selalu ditingkatkan dengan menekankan prinsip kemitraan, yaitu dengan saling mengerti kebutuhan satu sama lain, keberhasilan dari kerjasama ini menjadi terwujud dan berjalan dengan baik melalui diskusi/hubungan bersama tanpa adanya perselisihan pendapat sehingga dapat disetujui bersama dan berjalan dengan baik. Dimana ada suatu hal yang dianggap sebagai permasalahan harus diselesaikan di saat kedua belah pihak yaitu KPH Perhutani dan	Praktik PHBM baik di Indonesia secara umum maupun Jawa Timur secara khusus masih menimbulkan berbagai kekhawatiran mengenai upaya pembangunan berkelanjutan. Dari sudut pandang masyarakat desa hutan melalui LMDH, pada kondisi eksisting masih belum cukup berdaya utamanya dari segi ekonomi, sosial, dan Pengembangan lingkungan.  Kondisi ini yang kemudian coba diperbaiki dengan Revolusi Mental berbasis <i>Community Based Development</i> (CBD)

	<p>lahan petani kopi hutan. Perubahan ekonomi masyarakat desa hutan mengakibatkan perubahan struktur pada masyarakat desa hutan yang mengelola lahan di hutan karena terjadi mobilitas secara vertikal dari masyarakat kelas bawah menjadi masyarakat kelas atas.</p>	<p>LMDH Wono Mulyo Jengglunharjo bertemu dalam acara rapat diskusi bersama.</p>	<p>desa hutan. Pertumbuhan LMDH dan lahan tumpangsari yang berkorelasi positif terhadap penurunan pencurian dan kerusakan SDH dicoba untuk diperbaiki sistem kelembagaannya. Revolusi Mental menggambarkan paradigma baru yang disesuaikan dengan kondisi struktural dan kultural.</p>
<b>Metode</b>	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
<b>Peneliti Terdahulu yang Menjadi Acuan</b>	Tidak diketahui	Tidak diketahui	Tidak diketahui
<b>Keunggulan Penelitian</b>	<p>Dapat menjelaskan dan menggambarkan proses pelebagaan LMDH serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat hasil dari dampak pelaksanaan</p>	<p>Dapat menjelaskan proses kerjasama yang terjalin antara KPH Perhutani dan LMDH dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan.</p>	<p>Menjelaskan pelaksanaan Program PHBM yang melibatkan banyak pihak yang di dalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan tetapi dapat dikendalikan dengan metode pengembangan</p>

	program tersebut.		revolusi mental dari para pelaksana program salah satunya adalah para anggota LMDH yang beranggotakan para petani yang menggunakan lahan Perhutani.
<b>Persamaan Dengan Penelitian Ini</b>	Menggambarkan perubahan keadaan kesejahteraan masyarakat desa hutan.	Menggambarkan kerjasama yang terjalin antara Perhutani dan masyarakat untuk kepentingan pelestarian hutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Menjelaskan strategi yang dilakukan oleh LMDH dalam proses Program PHBM untuk tujuan mensejahterakan para anggota LMDH yaitu para petani.
<b>Perbedaan Dengan Penelitian Ini</b>	Berfokus pada pelaksanaan program dan kelembagaan LMDH.	Berfokus pada kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu Perhutani dan masyarakat sehingga tujuan program terlaksana dengan baik.	Lingkup penelitian yang lebih luas, yaitu meliputi seluruh wilayah Jawa Timur. Selain itu dalam penelitian ini hanya menjelaskan salah satu strategi saja yang dilakukan oleh LMDH yaitu berbasis <i>Community Based Development</i> (CBD).

**Lampiran 2**

**Pedoman Wawancara**

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI PADA  
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN "TAMAN PUTRI" DESA  
KEMIRI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

**IDENTITAS INFORMAN**

**Nama** : .....

**Alamat** : .....

**Umur** : .....

**Jenis Kelamin** : .....

**Pendidikan** : .....

**Pekerjaan** : .....

**A. Untuk Informan Pokok**

**Program BHBM**

- 1) Apakah bisa anda jelaskan tentang Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ?
- 2) Siapa saja pihak-pihak yang berperan dalam terlaksananya program PHBM ?
- 3) Sejak kapan program PHBM ini dilaksanakan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?
- 4) Apa tujuan dilaksanakannya Program PHBM ini ?
- 5) Apa yang menjadi faktor pendorong sehingga dilaksanakan Program PHBM ini di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?
- 6) Apa saja kegiatan yang diprogramkan dalam Program PHBM ?

- 7) Strategi apa yang anda gunakan sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam program ini ?

## **LMDH “Taman Putri”**

- 1) Apakah bisa anda jelaskan tentang LMDH “Taman Putri” ?
- 2) Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam terbentuknya LMDH “Taman Putri”?
- 3) Apa tujuan dibentuknya LMDH “Taman Putri”?
- 4) Sejak Kapan LMDH “Taman Putri” terbentuk di Desa Kemiri ?
- 5) Apa yang menjadi faktor pendorong dibentuknya LMDH “Taman Putri” di Desa Kemiri?
- 6) Apa saja kegiatan yang dilakukan di dalam LMDH “Taman Putri” ?
- 7) Strategi apa yang digunakan dalam LMDH “Taman Putri” sehingga masyarakat desa hutan mau berpartisipasi aktif salam lembaga ini ?

## **Kesejahteraan anggota LMDH “Taman Putri” dan masyarakat sekitar**

- 1) Bagaimana pengaruh dalam kehidupan anda dengan terlaksanannya Program PHBM dan terbentuknya LMDH “Taman Putri” di Desa Kemiri?
- 2) Apakah kehidupan anda menjadi lebih sejahtera setelah program PHBM terlaksana dan LMDH “Taman Putri” terbentuk di Desa Kemiri ?
- 3) Apakah anda melihat Program PHBM dan terbentuknya LMDH “Taman Putri” memberikan dampak baik untuk kehidupan masyarakat Desa Kemiri ?

## **Keberlanjutan Program**

- 1) Apakah anda memiliki saran dan kritik terhadap pelaksanaan Program PHBM dan LMDH “Taman Putri”?
- 2) Bagaimana harapan anda terhadap Program PHBM dan LMDH “Taman Putri”?

## **B. Untuk Informan Tambahan**

### **Program BIBM**

- 1) Apakah bisa anda jelaskan tentang Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ?
- 2) Siapa saja pihak-pihak yang berperan dalam terlaksananya program PHBM ?
- 3) Sejak kapan program PHBM ini dilaksanakan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?
- 4) Apa tujuan dilaksanakannya Program PHBM ini ?
- 5) Apa yang menjadi faktor pendorong sehingga dilaksanakan Program PHBM ini di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?
- 6) Apa saja kegiatan yang diprogramkan dalam Program PHBM ?
- 7) Strategi apa yang anda gunakan sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam program ini ?

### **LMDH “Taman Putri”**

- 1) Apakah bisa anda jelaskan tentang LMDH “Taman Putri” ?
- 2) Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam terbentuknya LMDH “Taman Putri”?
- 3) Apa tujuan dibentuknya LMDH “Taman Putri”?
- 4) Sejak Kapan LMDH “Taman Putri” terbentuk di Desa Kemiri ?
- 5) Apa yang menjadi faktor pendorong dibentuknya LMDH “Taman Putri” di Desa Kemiri?
- 6) Apa saja kegiatan yang dilakukan di dalam LMDH “Taman Putri” ?
- 7) Strategi apa yang digunakan dalam LMDH “Taman Putri” sehingga masyarakat desa hutan mau berpartisipasi aktif dalam lembaga ini ?

## **Kesejahteraan anggota LMDH “Taman Putri”**

- 1) Bagaimana pengaruh dalam kehidupan anda dengan terlaksanannya Program PHBM dan terbentuknya LMDH “Taman Putri” di Desa Kemiri?
- 2) Apakah kehidupan anda menjadi lebih sejahtera setelah program PHBM terlaksana dan LMDH “Taman Putri” terbentuk di Desa Kemiri ?
- 3) Apakah anda melihat Program PHBM dan terbentuknya LMDH “Taman Putri” memberikan dampak baik untuk kehidupan masyarakat Desa Kemiri ?

## **Keberlanjutan Program**

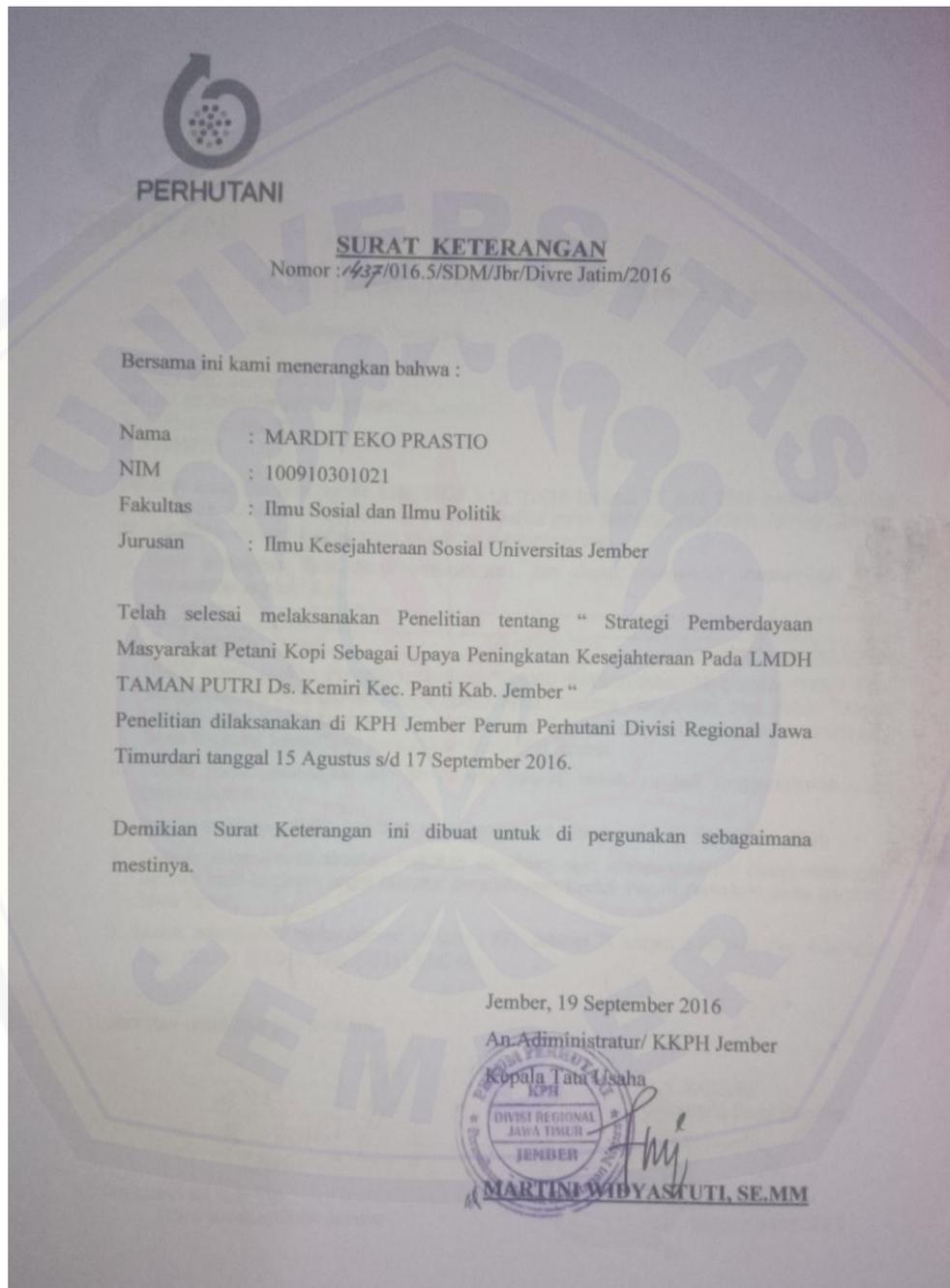
- 1) Apakah anda memiliki saran dan kritik terhadap pelaksanaan Program PHBM dan LMDH “Taman Putri”?
- 2) Bagaimana harapan anda terhadap Program PHBM dan LMDH “Taman Putri”?



4000g		24 Taman				Taman		
No	kg							
39	Hadi	10	1	P. Rum.	20	39	P. Hafid	8
40	Holi Fah	3	2	TO P. Nia	1	40	P. Liki	2
1	P. Yan	8	3	Sumarti	1	1	P. Ces	2
2	P. Udik	1	4	P. Nur Junus	5	2	P. Tein	2
3	P. Rochyeh	2	5	P. Mohlis	5	3	Paizan	2
4	wasid	1	6	P. Mol	12	4	watNO	2
5	P. kom	1	7	PONIMAN	10	5	Ceman	2
6	E di	1	8	Salamin	1	6	Ces	2
7	Sumiat	6	9	P. Mohlis	1	7	P. SIF	1
8	Misyono	2	10	Dian	3	8	P. SUTIK	3
9	P. yayuk	3	1	Ma' Lum	3	9	Teger	4
50	Puama	1	2	Ser. boch	2	50	P. jukabRani	5
1	P. Asmari	1	3	B. Si Ful	2	1	B. Faithor	1
2	P. Fandi	4	4	P. SudiN	4	2	B. Nur Julia	2
3	Ser-nami	1	5	P. HerNA	3	3	P. muh Lis	2
4	P. Ser mui	3	6	sungkal	10	4	P. Im. saki	2
5	B. Misraex	1	7	P. SudiN	10	5	P. Sia	2
6	P. marhami	2	8	P. Ahmad	2	6	P. Ha	4
7	P. jumad	2	9	Halim	2	7	jeki	4
8	P. mu'is	3	10	P. Kbal	6	8	P. TawfiG	1
9	P. Lia	2	1	P. wid	6	9	NYOTO	1
60	B. Rianto	3	2	Miaton	3	60	P. Surani	3
1	Laman	6	3	wa fid	8	1	P. Hal	3
2	Sam	3	4	mad sa'id	8	2	juf Ri	5
3	P. Fita. Pr	2	5	Ani	7	3	P. IFa	1
4	juno	4	6	P. FATHOR	7	4	kiki	15
5	B. luluh	8	7	matbi	6	5	P. Cahyo	4
6	P. AGIL	3	8	P. yuyun	2	6	Usman	1
7	P. ANWARI	12	9	Nisam	1	7	P. man vur	8
68	P. Sum.	2	30	P. Xul	3	8	B. Nur jemmil	2
			1	Sul. P. Fia.	5	9	P. P. Ri	6
			2	P. SudiN	3	10	P. udik	8
			3	Maniso	6	1	P. Hal	2
			4	B. HOS	6	2	P. Taufiq	1
			5	jono	3	3	P. To	2
			6	B. FITRI	10	4	P. Koyin	1
			7	Sumiat	2	5	P. RiS	2
			8	P. Si Sid	1	76	MUNIR	1

Lampiran 5

Surat-Surat Ijin Penelitian



Surat Keterangan Penelitian Perhutani Jember

FROM : BIRD SEKNIT UNIT 11 FAX NO. : 031 5474313 9 Aug. 2016 9:37 PL

109



### PERHUTANI

Nomor : 482/016-S/Sekdivre/jatin  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian

Surabaya, 8 Agustus 2016

Kepada Yth.  
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember  
Jl. Kalimantan No. 37  
Di - JEMBER

Menarik surat Saudara nomor 1030/UN25.3.1/LT/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal tersebut pada pokok surat yang kami terima tanggal melalui surat Administratur/KKPH Jember tanggal 27 Juli 2016, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menyetujui mahasiswa/i Fisip Universitas Jember, a.n. :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Mardleko Prastio	100910301026	Ilmu Kesejahteraan Sosial

Untuk melaksanakan Penelitian tentang "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan TAMAN PUTERI Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember" di wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur pada satuan kerja KPH Jember.

2. Segala biaya, akomodasi dan ijin kepada instansi terkait menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.
3. Jangka waktu penelitian terhitung mulai tanggal 15 Agustus s.d. 17 September 2016
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan hasil kegiatan untuk literatur perpustakaan Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.
5. Untuk selanjutnya berkoordinasi dengan : KPH Jember Jl. Letjen S Parmen No. 4 Jember, Telp. (0331) 336841, Fax. (0331) 336241.

Demikian untuk menjadi maklum.

DAFTAR N. DIVISI LINTA	OPRT
NO. DA. NO. 425	
TANGGAL : 9-8-2016	

Y. KADIVRE  
Sekretaris Divisi Regional

Y. YAHYA AMIN, MP  
PMT. 19651126199303 1

Tembusan Kepada Yth.  
- Administratur/KKPH Jember

Unit II Jawa Timur II Ganteng Kali No. 49 Surabaya

Surat Ijin Penelitian Perhutani Pusat Surabaya

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. 1. Camat Panti Kab. Jember  
2. Kepala Perum Perhutani KPH Jember  
di -  
TEMPAT

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 072/1096/314/2016

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

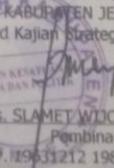
Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 27 Juni 2016 Nomor : 1030/UN25.3.1/LT/2016 perihal Ijin Melaksanakan Penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama / NIM. : Mardit Eko Prastio 100910301021  
Instansi : FISIP / Ilmu Kesejahteraan Sosial / Universitas Jember  
Alamat : Jl. Bangka Raya 31 Jember  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul :  
"Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan "Taman Putri" Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember".  
Lokasi : Desa Kemiri Kec. Panti Kab. Jember dan Perum Perhutani KPH Jember  
Tanggal : 27-06-2016 s/d 27-08-2016

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.  
Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :  
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan  
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik  
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.  
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 29-06-2016

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Kabid Kajian Strategis & Politis  
  
Drs. SLAMET WIDOKO, M.Si  
Pembina  
NIP. 129031212 198606 1004

Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember  
2. Ybs.

Surat Ijin Penelitian Bakesbangpol

Lampiran 6

Dokumentasi Foto-Foto



Wawancara dengan informan HB



Wawancara dengan Informan IS



Wawancara dengan informan SY



Wawancara dengan informan TH



Tempat pengolahan Kopi salah satu petani anggota LMDH



Kandang ternak milik salah satu petani anggota LMDH